# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
## Kegiatan Penilikan Ke-2 pada PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa
## Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

a. Tanggal Audit : 13 – 20 Februari 2023
b. Metode : *Onsite Audit*
c. Kriteria Audit yang Digunakan : 1) Lampiran 1.3 Kepdirjen PHPLNo.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja PHPL Pada Pemegang IUPHHK-HT
2) Lampiran 2.2 Kepdirjen PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUPHHK-HT

## I. IDENTITAS LPPHPL

1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4. Nomor Telpon : 0541-747798
   Email : trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur : Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit :
   a) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHPL Sosial / merangkap Ketua Tim Audit)
   b) Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor PHPL Prasyarat)
   c) Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi)
   d) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi)
   e) Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
7. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

## II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT PERMATA HIJAU KHATULISTIWA**
2. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
4. SK IUPHHK- HT : SK Menteri Kehutanan No. SK.631/Menhut-II/2010 Tanggal 11 November 2010 Jo. SK Kepala BKPM No.1/1/IUPHHK-PB/PMDN/ 2016 Tanggal 21 Juni 2016 Jo. SK MenLHK No. 562/MENLHK/ SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021
5. Luas dan Lokasi : 26.345 Hektar di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan : Yudiana, S. Hut (Direktur )
   Jaka Suyudiono (Komisaris)
7. Nama MR *Auditee* : Herry Harnanki

## III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-2 PHL

1. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian**

   Waktu : 13 Februari 2023
   Tempat : Samarinda
   Ringkasan Catatan :
   a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.
   b) Hasil pelaksanaan koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1 13/1/2021, memuat saran dan masukan dari masing-masing instansi serta informasi tambahan lainnya terkait *auditee*.

2. **Pertemuan Pembukaan**

   Waktu : 14 Februari 2023
   Tempat : Basecamp PT Permata Hijau Khatulistiwa di Kab. Kutai Timur
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Swadaya Perkasa yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) *Auditee* memahami dengan baik tujuan audit, kriteria audit yang digunakan dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dapat melaksanakan audit sesuai *timeline* kegiatan audit yang ditetapkan.
   c) Pertemuan Pembukaan dibuatkan BAP dan Daftar Hadir menggunakan form P01-3.11 Rev.1 13/1/2021.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

   Waktu : 14 - 18 Februari 2023
   Tempat : *On-site* / Lokasi areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa di Kab. Kutai Timur
   Ringkasan Catatan :
   a) Pengumpulan data audit meliputi dokumen dan implementasinya di lapangan pada rentang waktu:
      - 1 (satu) tahun terakhir untuk indikator dan kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar penilaian kinerja PHPL; dan
      - 1 (satu) tahun untuk standar verifikasi legalitas Kayu

   b) Audit dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan secara sampling kesesuain fisik atau lokasi kegiatan dengan pelaporan.
   c) Bukti audit yang terverifikasi dan analisis kesesuiannya dengan norma kematangan/pemenuhan verifier serta nilai yang diberikan, dicatat menggunakan form checklist audit, masing-masing form P01-3.12.a (Prasyarat), P01-3.12.b (Produksi), P01-3.12.c (Ekologi), P01-3.12.d (Sosial), dan P01-4b.09a (standar VLK).

4. **Pertemuan Penutupan**

   Waktu : 18 Februari 2023
   Tempat : Basecamp PT Permata Hijau Khatulistiwa di Kab. Kutai Timur
   Ringkasan Catatan :
   a) Dihadir MR dan personil PT Permata Hijau Khatulistiwa yang ditugaskan mendampingi auditor.
   b) Tim auditor menyampaikan hasil penilaian kinerja PHPL baik pada indikator dan kriteria standar kinerja PHPL maupun verifier penyusun standar VLK, beserta kesimpulan audit dan penerbitan Catatan Ketidaksesuaian nya.
   *c) Auditee* menyetujui hasil penilian beserta temuan ketidaksesuaianya, dan menandatangani dokumen:
      - Berita Acara Pelaksanaan menggunakan form P01-3.15;
      - Kesimpulan Audit menggunakan form P01-3.13; dan
      - Catatan Ketidaksesuaian menggunakan form P01-3.14.

5. **Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian**

| | | |
|---|---|---|
| Waktu | : | 20 Februari 2023 |
| Tempat | : | Samarinda |
| Ringkasan Catatan | : | a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.<br>b) KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan kegiatan sertifikasi selanjutnya.<br>c) Hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 |

6. **Pengambilan Keputusan**

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal | : | 10 Maret 2023 |
| Keputusan Penilaian | : | a) PT Permata Hijau Khatulistiwa dinyatakan telah LULUS penilaian kinerja PHPL dengan predikat **BAIK** (nilai akhir kinerja PHPL mencapai **87,30%** tanpa verifier dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK).<br>b) Sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) PT Permata Hijau Khatulistiwa dipertahankan sesuai masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya. |

## IV. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

### 1. STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT

#### A. KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1 | : | Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HT, Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja). |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen legal berupa Akta Pendirian No. 98 tanggal 18 Februari 2010 oleh Notaris Robert Purba, SH dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. AHU-12864.AH.01.01. tanggal 12 Maret 2010, Akta Perubahan yaitu Akta No. 33 Tanggal 20 Mei 2022 oleh Notaris Esther P.E. Jovina.SH. MKn dan Surat Penerimaan Pemberitahuan oleh Dirjen Administrasi dan Umum Kemenkumham No. AHU-AH.01.09-0016071 tanggal 27 Mei 2022, NIB Berbasis Resiko No. 8120000941871 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan dari sistem OSS, Perubahan ke-3 tanggal 7 September 2022, NPWP No. 02.991.961.0-011.000. SK IUPHHK-HTI yaitu No. SK. 631/Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Buana Inti Energi atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 26.345 Ha di Kabupaten Kutai Timur, SK. Kepala BKPM No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDH/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 631/Menhut-II/2010, SK. Gubernur Kaltim No. 660.1/IK.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL Bidang Kehuatanan Untuk Rencana Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan IUPHHK-HT Oleh PT Buana Inti Energi Luas Cadangan 25.465 Ha di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1625/LINGK/BPPMD-PTSP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Izin Lingkungan Atas Dokumen AMDAL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Luas Areal ± 26.345 Ha dari PT Buana Inti Energi kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Penambahan Pengelolaan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang perubahan Nomenklatur IUPHHK-HTI menjadi PBPH, Dokumen administrasi tata batas berupa Laporan TBT No. 19/BPKH.IV/IUPHHK/2018. LOI No. 121/MPS.PHK/LOI/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang pemberitahuan garis besar mengenai maksud para pihak untuk melakukanperkerjaan penataan batas Kawasan hutan pada areal kerja PT Mahakam Persada Sakti dan Permata Hijau Khatulistiwa dan RFC No. 051/PHK/RFC/2021 tentang Perjanjian Pelaksanaan Tata Batas APL, Surat No. 22/PHK/SSL/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV di Samarinda tentang Pengukuhan dan Pemancangan Tata Batas Definitif Area APL Dalam PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa, SK Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. SK. 63/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pembentukakn Tim Pelaksanan Penataan Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Hilir Sungai Sedulang – Hilir Sungai Benasar Besar sepanjang 7.318,13 m terletak di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, Surat No. S.611/BPKH.IV/PLA.2/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penyampaian Instruksi Kerja Pemancangan Batas Sementara dan Identitas Ha-hak Pihak ketiga Dalam Kawasan Hutan Areal PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa, Lampiran Instruksi Kerja No. INS.99/BPKH.IV/PLA.28/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Identifikasi Hak-hak Pihak Ketiga dalam Kawasan Hutan Kelompok Hutan Produksi Tetap oleh Balai Pemanfaatan Kawasan Wilayah IV Samarinda, Surat No. S.616/BPKH/PLA.2/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Permohonan Bantuan Tenaga, Surat Tugas No. 05/ST-Dir/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penugasan Pendampingan, Surat No. S.607/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Permohonan Bantuan Tenaga yang ditujukan kepada Kepala UPTD KPHP Bengalon, Surat No. S. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 609/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Permohonan Bantuan Tenaga yang ditembuskan kepada Camat Batu Ampar dan Desa Mawai Indah. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di Base Camp KM 16 lengkap sesuai dengan tingkat realisasi penataan batas areal kerja yang telah dilakukan di lapangan. |
| 2. | Verifier 1.1.2 | : | Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB). |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Laporan TBT No. 19/BPKH.IV/IUPHHK/2018 berjudul Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Batas Persekutuan Dengan PT Mahakam Persada Sakti, IUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya dan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, realisasi penataan batas luar areal kerja IUPHHK-HTI PT Permata Hijau Khatulistiwa sudah temu gelang (100 %) dengan total panjang batas 100.256,46 Meter. Terhadap APL yang berada di dalam areal kerja, sesuai dengan Instruksi Kerja No. INS.99/BPKH.IV/PLA.28/2022 tanggal 8 Agustus 2022 kegiatan penataan batas partisipatif direncanakan sepanjang ± 7.318,13 m dimana sampai saat dilakukannya kegiatan Penilkan 2 pemasangan patok definitif terealisasi 60 patok dari 250 patok. Secara keseluruhan realisasi penataan batas yang telah dilakukan sebesar 100.256,46 m dari 107.256,46 m atau terealisasi sebesar 98,70 %. |
| 3. | Verifier 1.1.3 | : | Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK) |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat konflik batas di areal batas fungsi kawasan APL dan HP di Desa Mawai Indah (SP III) dan Desa Himba Lestari (SP IV) dan ada upaya PT Permata Hijau Khatulistiwa untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian |
| 4. | Verifier 1.1.4 | : | Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi Kawasan dan atau luas areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*). |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dengan terbitnya SK.718/2014 berubah menjadi APL dan pihak PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan Revisi RKUPHHK-HT pada tahun 2017 dan telah disahkan dengan No. SK.2437/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tanggal 27 April 2017. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mengakomodir dalam pembuatan Peta Kerja dan tidak melakukan kegiatan di dalamnya. |
| 5. | Verifier 1.1.5 | : | Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).* |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Tidak diterapkan (N/A)** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil telaah dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012 – 2021 dan RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, hasil wawancara dan pengamatan lapangan diketahui bahwa di areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak terdapat penggunaan kawasan sah di luar sektor kehutanan. |
| 6. | Verifier 1.1.6 | | Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK |
| | Bobot | | **Dominan** |
| | Nilai | | **Baik** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | | Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal kerja PT Permata Hijau Khatulistiwa berupa penggunaan oleh masyarakat untuk pembuatan Kebun, Pemukiman, Tanaman Pisang, Tanaman Sahang (Mrica), Kelapa Sawit serta lahan dalam keadaan ditebas/dibersihkan dengan total luas mencapai 2.394 Ha. Luas keseluruhan areal kerja 26.345 Ha, dengan demikian luas areal yang bisa dikuasai oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa sebesar 90,91%. |
| Nilai Kinerja Indikator 1.1 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **83,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

2. Indikator 1.2 :

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.2.1 | : | Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur No. SK/001/PHK/XI/2016 tanggal 7 November 2016, dokumen tersebut sesuai dengan kerangka PHPL karena di dalamnya terkandung kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial. Pada sebagian periode Penilikan 2 ini terdapat dokumen Visi Misi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa No. SK/001/PHK/6/2022 tanggal 6 Juni 2022. Perubahan visi misi dilakukan terkait dengan perubahan Direksi sedangkan isi visi misi masih sama dengan yang termuat dalam SK/001/PHK/XI/2016 tanggal 7 November 2016. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi Misi kepada karyawan dan kontraktor yang dilaksanakan pada tanggal 23, 26 dan 28 Januari 2023 di depan Office PT Permata Hijau Khatulistiwa yang dilaksanakan oleh Tim CS, Head Departement dan Estate Manager PT Permata Hijau Khatulistiwa. Berita Acara ditanda tangani oleh Ayu Kurnia Sari (Admin PA/GA) diketahui oleh Rinto (Asst HR) dan disetujui oleh Yudiana (Estate Manajer). Terdapat dokumentasi kegiatan namun tidak terdapat Daftar Hadir. Di Base Camp PT Permata Hijau Khatulistiwa yang saat ini dijadikan mess karyawaan mitra menunjukan tidak terdapat pemajangan visi misi padahal pada lokasi tersebut terdapat karyawan berjumlah 197 orang yang datang pada bulan September dan November 2022. Pada mess karyawan yang baru dibangun juga tidak ditemukan adanya pemajangan visi misi perusahaan. |
| 2. | Verifier 1.2.2 | : | Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL. |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Implementasi kegiatan pengelolaan hutan tahun 2021 dan tahun 2022 yang dilakukan PT Permata Hijau Khatulistiwa hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi seperti tersedianya dokumen perencanaan RKUPH dan RKTPH yang telah disahkan, terlaksananya kegiatan produksi kayu dari hutan alam maupun dari hutan tanaman, terealisasinya kegiatan peningkatan SDM dll namun masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan diantaranya yaitu penataan batas partisipatif yang berbatasan dengan APL belum terealisasi, pelaporan kegiatan melalui sistem informasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, penataan batas kawasan lindung terealisasi 54,23 %, sosialisasi perlindungan hutan belum efektif, TPS Limbah B3 belum ada (masih bergabung dengan PT MPS), pengelolaan flora dan fauna belum sesuai dengan Prosedur, program CSR belum dijelaskan secara rinci di masing-masing desa, pelaporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik dilakukan setahun sekali (dalam ketentuan pelaporan dilakukan persemester). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verifier 1.2.3 | : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan pada saat pelaksanaan Penilikan 2 hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan, terdapat Daftar Ganis PH sebanyak 10 orang yang meliputi Ganis PH Canhut 3 orang, Ganis PH Binhut 2 orang, Ganis PH PKB-R 2 orang, Ganis PH Nenhut 2 orang dan Ganis PH Kurpet 1 orang, namun demikian sebagian Ganis PH tersebut tidak berada di lapangan (pindah ke Manajemen lain dalam satu grup) sehingga tersisa 7 orang atau 70 %. |
| 4. | Verifier 1.2.4 | : | Peningkatan kompetensi SDM |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Peningkatan SDM PT Permata Hijau Khatulistiwa tahun 2021 dan 2022 rata-rata terealisasi sebesar 101 % yang meliputi pendidikan dan pelatihan diantaranya Satgas Perlindungan dan Penyelamatan Orang Utan, Ganis PKBR, Ganis Canhut, Training Petugas Karhutla Kualifikasi I, Training Micraplanning, Refreshment Graduante Acceleration XII Program Program Batch VIII & IX, Refreshment Mador Batch II dan Assistant Batch I, PMS & PMRS, Refreshment Departemen HR, Diklat Ganis Kurpet, Training Brigade Dalkarhutla Kualifikasi 1 (Fire Crew 1), Diklat Ganis PHPL Nenhut, Training dan Sosialisasi Seedling Quality Assesment, Graduate Acceleration Program Batch XIV, Pelatihan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Non Proper, GIS Trainnng. |
| 5. | Verifier 1.2.5 | : | Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan. |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap meliputi Daftar Karyawan, Kartu SIM Ganis PH, Surat Pengangkatan Ganis PH oleh BPHP (BPHL), Surat Penempatan oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa, Struktur Organisasi, Serikat Pekerja, Peraturan Perusahaan, Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), Bukti Bayar Iuran BPJS, Upah Minimum Povinsi (UMP), Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, Wajib Lapor Ketenaga kerjaan dan dokumen PKWT, Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur, Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Laporan Bulanan Tenaga Teknis, Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan, Rencana Pelatihan Karyawan, Realisasi Pelatihan Karyawan, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Bukti Cuti Karyawan dan SOP-SOP tentang ketenagakerjaan |
| Nilai Kinerja Indikator 1.2 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **83,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

3. Indikator 1.3 :
   Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.3.1 | : | Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Struktur Organisasi dan Job Diskripsi yang telah disahkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan No. SK. 057/DIR/PHK/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 namun antara Struktur Organisasi dan Daftar Karyawan tidak sinkron. Tersedia perubahan struktur organisasi sesuai dengan SK Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa No. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 002/DIR/PHK/I/2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT Permata Hijau Khatulistiwa. Struktur yang tersedia terdiri dari dua bagian, yang pertama menggambarkan Struktur Organisasi di tingkat Estate sedangkan yang kedua menggambarkan Struktur Organisasi di tingkat Direksi. Dari hasil telaah diketahui bahwa terdapat perbedaan pada jumlah Askep di kedua Struktur Organisasi tersebut. Terdapat rangkap jabatan pada Direktur dan Manajer Estate. |
| 2. | Verifier 1.3.2 | : | Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana. |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berbasis teknologi (internet). SIM didukung oleh ketersediaan perangkat keras seperti Printer, Fotocopy, Printer Barcode, Proyektor, Radio RIG, Finger, Tower Rio, Perangkat Server, HP dan Perangkat Lunak Win 10. Proses alur informasi produksi dan peralatan serta informasi lainnya dari lapangan dilaporkan setiap hari oleh Mandor kepada atasannya melalui Admin pada masing-masing Bagian dan dikumpulkan di kantor/basecamp. Selanjutnya admin mencatat dan merekap data lapangan untuk diketahui oleh Asisten dan Askep yang selanjutnya dilaporkan kepada Manager. Laporan kemudian dikirim kepada HO berupa soft copy melalui email dilampiri dengan scan hasil produksi lapangan. Manajemen juga membentuk grup Whats App dalam tingkatan Estate yang anggotanya seluruh karyawan Estate, dan grup Whats App level manager dan/atau Askep untuk memudahkan komunikasi pada level manager. Keberadaan perangkat SIM termasuk mencukupi dan memadai serta terdapat jaringan seluler pada tempat dan posisi tertentu di lapangan. Sebelum melakukan pekerjaan secara rutin tiap pagi juga diadakan breefing khususnya kepada para mandor mengenai informasi pekerjaan yang harus dilakukan. |
| 3. | Verifier 1.3.3 | : | Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi seperti Operator SIPUHH yaitu Candra Pamadya, S. Hut. sesuai SK Direktur No. 09/PHK/0401/2021 tanggal 4 Januari 2021, operator pelaksana SIPUHH yaitu Nurcahyadi sesuai SK. Direktur No. 16/PHK/0609/2021 tanggal 6 September 2021, operator SEHATI yaitu Wardani sesuai dengan SK. Direktur No. 06/PHK/1506/2020 tanggal 15 Juni 2020, operator SIPONGI sesuai SK. Direktur No. 51/DIR/PHK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yaitu Roni Rijali, operator SICAKAP yaitu Esau Palipus sesuai dengan SK. No. SK-16/PHK/0109/2022 tanggal 1 September 2022. Terkait dengan implementasi pelaporan dalam rangka pelaksanaan kewajiban, pelaporan SIPUHH dan SIPNBP dilaksanakan sesuai ketentuan dimana pada periode audit Penilikan 2 telah dibuat e-LHC dan diterbitkan e-Buku Ukur dan 8 e-LHP untuk 322 batang kayu bulat dengan volume 241,91 m3 yang berasal dari kayu alam, dan 51.844 m3 kayu tanaman, juga telah dibuat SPP PSDH dan DR secara elektronik melalui SIPNBP sebesar Rp Rp. 465.659.964 dan US$ 4.291,37, pelaporan SEHATI telah dilaksanakan sesuai kentuan, pelaporan SIPONGI dilaksanakan sesuai ketentuan dan tercatat periode Penilikan 2 memiliki skore antara 82 % – 93 %, adapun pelaporan SICAKAP belum sepenuhnya sesuai ketentuan dimana Laporan bulanan tahun 2022 menunjukan 10 bulan terlambat, 1 bulan tepat waktu dan 1 bulan belum dilaporkan yaitu bulan Desember, pada parameter Progres Tata batas, Kemitraan, Sertifikasi PHPL/VLK, Pemetaan Konflik, Neraca Tanaman dan parameter Keuangan dalam SICAKAP tidak ada data. |
| 4. | Verifier 1.3.4 | : | Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya. |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI), terdapat Surat Keputusan Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa No. 046/DIR/PHK/X/2022 tanggal 31 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Oktober 2022 tentang Penunjukan Satuan Pengawas Internal pada beberapa level manajemen yaitu tingkat MO dengan personal Jaka S sebagai ketua dengan anggota Erwin A, Alian N, Andys R dan Winda Z, di tingkat Estate terdapat Roni Rijali sebagai ketua dengan anggota Agmi, Melani, Jhon Samosir dan Wilhelmus Suli, di level SIM terdapat Widodo S sebagai ketua dengan anggota Hengky S, Nico A dan Hadi Purnomo sedangkan di level keuangan terdapat Jevri Fernando sebagai ketua dengan anggota Jhon Samosir, Tri Wahyuni, Ganda Satrio dan Herry Hernanki. Terdapat SOP Internal Audit No. 001-PHK-SPI-SOP terbit tanggal 7 Januari 2019 Revisi 1 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat oleh SPI Head, diperiksa oleh Manajer Estate dan disahkan oleh Direktur dengan ruang lingkup meliputi audit kepatuhan terhadap SOP, kegiatan operasional perusahaan, audit khusus, dan review atas aspek keuangan. Terkait dengan adanya perubahan direksi pada tahun 2022 sesuai Akta No. 33 Tanggal 20 Mei 2022 oleh Notaris Esther P.E. Jovina.SH. MKn dimana saat ini Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa juga merangkap jabatan sebagai Estate Manejer maka terjadi konflik kepentingan sehingga kinerja SPI menjadi kurang efektif. Terdapat Sumary Report hasil kegiatan Internal Audit hasil stock opname 31 Oktober 2022 namun belum meliputi seluruh tahapan kegiatan aspek pembangunan HTI baik sisi operasional yang dimulai pada kegiatan perencanaan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, sarana prasarana dan lainnya. |
| 5. | Verifier 1.3.5 | : | Adanya Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil temuan pada Sumary Report hasil kegiatan Internal Audit hasil stock opname 31 Oktober 2022 diketahui terdapat tindakan perbaikan manajemen terkait dengan temuan SPI sedangkan terkait dengan hasil temuan SPI hasil pertemuan bulanan HTI yang tergabung dalam satu grup juga terdapat hasil evaluasi dan rekomendasi dari audit PHPL tahun 2020 telah direkomendasikan agar PT Permata Hijau Khatulistiwa membuat pelaporan masalah konflik sosial dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P. 5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Produksi namun pada periode Penilikan ke-2 belum ada tindak koreksi perbaikan, berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa Pelaporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik dilakukan setahun sekali (dalam ketentuan pelaporan dilakukan persemester). |
| Nilai Kinerja Indikator 1.3 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai **70,83 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

4. Indikator 1.4 :

   Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.4.1 | : | Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki desa binaan sebanyak 2 (dua) desa yaitu Mawai Indah dan Himba Lestari yang masuk dalam wilayah kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Selama periode Penilikan 2 kegiatan RKT Tahun 2021 dan Tahun 2022 PT Permata Hijau Khatulistiwa yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat desa Mawai Indah dan Himba Lestari telah dikonsultasikan dalam bentuk kegiatan sosialisasi atas dasar informasi awal yang memadai. Kegiatan sosialisasi di desa Mawai Indah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 1 April 2022 sedangkan sosialisasi di desa Himba Lestari dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 1 Februari 2022. Terkait dengan kegiatan operasional RKT 2023 PT Permata Hijau Khatulistiwa belum melakukan kegiatan sosialisasi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Verifier 1.4.2 | : | Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD |
| | Bobot | : | **Co-Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Penilikan 2 PT Permata Hijau Khatulistiwa melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar yaitu desa Mawai Indah dan Himba Lestari. Terkait dengan rencana kegiatan CSR PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan sosialisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Kegiatan sosialisasi di desa Mawai Indah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 1 April 2022 sedangkan sosialisasi di desa Himba Lestari dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 1 Februari 2022. Terkait dengan kegiatan CSR tahun 2023 PT Permata Hijau Khatulistiwa belum melakukan kegiatan sosialisasi. |
| 3. | Verifier 1.4.3 | : | Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode Penilikan 2 PT Permata Hijau Khatulistiwa melakukan sosialisasi kawasan lindung kegiatan kepada masyarakat sekitar yaitu desa Mawai Indah dan Himba Lestari. PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan sosialisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Kegiatan sosialisasi di desa Mawai Indah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 dan tanggal 1 April 2022 sedangkan sosialisasi di desa Himba Lestari dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 1 Februari 2022. Untuk tahun 2023 PT Permata Hijau Khatulistiwa belum melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat padahal terdapat perubahan kawasan lindung Sempadan Sungai sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode 2022 - 2031 yang telah disahkan melalui KepmenLHK No. SK.4815/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021. |
| Nilai Kinerja Indikator 1.4. | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai **66,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## B. KRITERIA PRODUKSI

5. Indikator 2.1 :
   Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1 | : | Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa mempunyai Dokumen RKUPH PBPH HP tahun 2022-2031 an. PT Permata Hijau Khatulistiwa Provinsi Kalimantan Timur. RKUPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.4815/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH HP Periode Tahun 2022-2031 an. PT Permata Hijau Khatulistiwa Prov. Kalimantan Timur. Keputusan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031 dan terkait dengan peringatan pemenuhan kewajiban RKU bahwa PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI.<br>Dokumen RKUPH periode 2022-2031 telah dilengkapi dengan peta lampiran skala 1 : 50.000 yang telah disahkan berdasarkan SK.4815/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Verifier 2.1.2 | : | Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPH (≤50%) Dimana kesesuaian untuk penataan areal kerja tahun 2021 sebesar 81,37 %, Penyiapan lahan tahun 2022 sebesar 92,86 % dan tahun 2023 sebesar 99,30 % sehingga rata-rata kesesuaian luas sebesar 91,18% dan masih terdapat *Carry Over* kegiatan pada tahun 2022 dan 2023. |
| 3. | Verifier 2.1.3 | : | Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%). |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan pemeriksaan lapangan secara random sampling 5 % dan berdasarkan BA Pemasangan Patok Batas *Compartemen* tahun 2022 dan 2023 didapatkan :<br>1. Terdapat tanda batas blok RKT 2023 ditemukan batas blok berupa plang RKT 2023, untuk plang RKT 2022 tidak dtemukan di lapangan dan yang ditemukan adalah plang RKT 2022 *Replanting*.<br>2. Terdapat tanda kompartemen/petak di lapangan, ditemukan identitas tanda batas petak/kompartemen berupa pal berupa paralon dan kayu. Tetapi ada beberapa patok kompartemen yang belum sesuai SOP seperti patok batas petak H 101 RKT 2023 belum konsisten dengan patok yang lain, dan pal Petak E 144 RKT 2023 belum mencantumkan identitas petak yang berdampingan |
| Nilai Kinerja Indikator 2.1 | | : | **SEDANG** dengan Nilai mencapai **77,78 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

6. Indikator 2.2 :
   Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.2.1 | : | Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Didalam PBPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa terdapat satu tipe ekosistem hutan yaitu tanah kering/mineral , terdapat hasil LHC untuk penyiapan lahan/LOA tahun 2021, 2022 dan 2023, dan terdapat data potensi berkala pada hutan tanaman yaitu *PMA (Plantation Montoring Assesment*) berumur 30, 42 dan 54 bulan untuk tahun 2020 , 2021 dan 2022 dan dilengkapi dengan peta pendukungnya. |
| 2. | Verifier 2.2.2 | : | Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/etat volume) |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mempunyai informasi riap tegakan hutan tanaman, dan telah membuat PSP sebanyak 6 kompartemen dan telah sesuai dengan SOP *Permanen Sample Plot* No. 005-PHK-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016 dan hasil Analisa riap tegakan hasil pengukuran PSP telah disampaikan kepada Kepala Balai Besar Litbang Ekosistem Hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | PHL . Hasil analisis riap belum digunakan dalam penentuan penghitungan JTT dan penghitungan JTT masih berdasarkan hasil ITSP/PHI. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.2 | | : | **BAIK** dengan Nilai mencapai **88,89 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

7. Indikator 2.3 :
   Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.3.1 | : | Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa telah mempunyai SOP seluruh tahapan silvikultur dengan lengkap dan belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sesuai dengan Lampiran X Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 tahun 2021. SOP THPB yang tersedia seperti SOP PAK, Inventarsiasi, PWH, Pengadaan Bibit, Penyaiapan lahan, Penanaman, Pemanenan dan Perlindungan Hutan. Dan implementasi di lapangan belum selurunya dilaksanakan seperti kegiatan PAK, Inventarisasi dan Perlindungan Hutan. |
| 2. | Verifier 2.3.2 | : | Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa Pada pelaksaaan PHI (*Pre Harvesting Inventory*) pada umur 52 bulan besarnya nilai MAI (*Mean Annual Increament*) adalah 25,21 M3/Ha/th untuk jenis *Acacia sp* dan *Eucalyptus sp* maka untuk tanaman dengan menggunakan daur 5 – 6 tahun nilai potensinya sebesar 126,05 M3/Ha-151,26 M3/Ha. |
| 3. | Verifier 2.3.3 | : | Tingkat kecukupan potensi permudaan |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki permudaan tanaman yang telah ditanam pada tahun 2022 dengan umur 6 sampai 18 bulan. Berdasarkan pelaksanaan PMA didapatkann potensi tanaman muda dengan rata-rata sebesar 86,3 %. |
| 4. | Verifier 2.3.4 | : | Struktur tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PBPH HP PT Permata Hijau Khatulistiwa mempunyai kelas umur sampai 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun sesuai dengan daur yang ditetapkan yaitu 6 (enam) tahun dan kelas umur tersebut telah tersedia merata sekitar 99,43 % |
| Nilai Kinerja Indikator 2.3 | | : | **BAIK** dengan Nilai mencapai **85,71 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

8. Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.4.1 | : | Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan , dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat . SOP yang tersedia seperti SOP perencanaan (SOP Microplanning) SOP Pemanenan (Hutan alam dan tanaman) , SOP paska pemanenan (HQA, RWA, HOA) dan belum semua SOP diimplementasikan seluruhnya di lapangan . |
| 2. | Verifier 2.4.2 | : | Limbah pemanfaatan hutan minimal |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Kegiatan pemanenan pada panen kayu tanaman mulai dilakukan pada tahun 2022 dan pemanenan kayu alam terakhir pada tahun 2021. Pada semua petak tebangan hutan tanaman yang telah dilakukan pemanenan telah dilakukan penghitungan limbah/RWA pada tahun 2022. Dimana rata-rata pada kegiatan nilai RWA sebesar 0,58 M3/Ha. Dengan luas tebangan seluas 455,5 Ha dan limbah 0,58 M3 /Ha maka jumlah limbah adalah 264,19 M3. Total produksi 36.225,88 m3 ditambah limbah menjadi 36.490,07 M3 sehingga nilai Fe menjadi 36.225,88/36.490,07 = 99,27 % |
| Nilai Kinerja Indikator 2.4 | | : | **BAIK** dengan Nilai mencapai **83,33 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

9. Indikator 2.5 :
Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.5.1 | : | Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/ RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/ RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*). |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen RKT secara lengkap tahun 2021, 2022 dan 2023 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval*.<br>• RKTPH PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2021 telah disahakan dan disetujui oleh Direktur melalui SK Nomor : SK-01/PHK/0201/2021 tgl. 2 Januari 2021<br>• RKTPH PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2022 telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa melalui SK Nomor : SK-01/PHK/0101/2022 tanggal 1 Januari 2022<br>• Terdapat Revisi Dokumen RKTPH tahun 2022 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan Nomor : SK-13/PHK/0106/2022 tanggal 1 Juni 2022<br>• Terdapat Revisi Dokumen RKTPH tahun 2022 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan Nomor : SK-17/PHK/2510/2022 tanggal 25 Oktober 2022 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Terdapat Dokumen RKTPH tahun 2023 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan Nomor : SK-01/PHK/0101/2023 tanggal 1 Januari 2023 |
| 2. | Verifier 2.5.2 | : | Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | • Terdapat peta kerja yang sesuai antara peta RKT 2021 yang telah disahkan secara *self approval* dan peta revisi RKU periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK 2437/MenLHK-PHL/UHP7HPL.1/4/2017.<br>• Terdapat peta kerja RKT 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara slf approval dan telah sesuai dengan Peta RKUPHH periode tahun 2022-2031 yang telah disahkan berdasarkan SK Kementreian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.4815/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021 .<br>• Peta tersebut terdapat kesesuaian dan telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen / dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. |
| 3. | Verifier 2.5.3 | : | Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *bufferzone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat penandaan batas blok dan petak RKT 2022 dan 2023 tetapi masih belum seluruhnya terlihat jelas di lapangan.<br>• Batas Blok RKT 2022, ditemukan plang RKT 2022 (*replanting*) dan untuk Plang RKT 2022 tidak ditemukan. Untuk batas kompartemen/petak berupa patok dari kayu atau paralon ditemukan di lapangan tetapi beberapa identitas patok belum seluruhnya sesuai dengan SOP.<br>• Batas Blok RKT 2023 ditemukan plang RKT 2023 dan batas kompartemen/petak berupa patok dari kayu atau paralon ditemukan di lapangan dan identitas patok belum seluruhnya sesuai dengan SOP.<br>• Penandaan Kawasan lindung baru mencapai 54,23 % dari target rencana penataan Kawasan lindung . Penanda batasan kawasan lindung meliputi kawasan lindung sempadan sungai. BZ HL , KPSL dan KPPN. |
| 4. | Verifier 2.5.4 | : | Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% .<br>• RKTPH tahun 2021 realisasi volume sebesar 11,83 % yaitu sebesar 249,91 M3 dari rencana tebangan 2.112 M3. Dan realisasi luas 1.35,2 Ha dari target 3.520,30 Ha atau 40,77%. Dan tidak ada penebangan diluar Blok RKT yang telah disahkan.<br>• Untuk Tahun 2022 terealisasi 455,51 Ha dari target luas 1294,8 Ha atau sebesar 29,51%, untuk target Volume sebesar 49.552,29 M3 (*Acacia sp*) terealisasi 36225,88 M3 sehingga tercapai 73,11%. Dimana lokasi sesuai dengan Peta RKT yang disahkan dan tidak ada kegiatan diluar blok tebangan. |

| | | |
|---|---|---|
| Nilai Kinerja Indikator 2.5 | : | **BAIK** dengan Nilai mencapai **80,95 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

10. Indikator 2.6 :
Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.6.1 | : | Kondisi kesehatan finansial |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *KAP Ojak Lumban Gaol* dapat diverifikasi bahwa Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2020 adalah:<br>• Nilai Likuiditas sebesar 102,60 % (>100%)<br>• Nilai Solvabilitas sebesar 97,17 % (<100%)<br>• Nilai rentabilitas sebesar negative<br>• Opini akuntan public menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material<br>Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *KAP Ojak Lumban Gaol* dapat diverifikasi bahwa Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2021 adalah:<br>• Nilai Likuiditas sebesar 43,18 % (<100%)<br>• Nilai Solvabilitas sebesar 120,95 % (>100%)<br>• Nilai rentabilitas sebesar negative<br>• Opini akuntan public menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material |
| 2. | Verifier 2.6.2 | : | Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi alokasi dana tahun 2020 sebesar >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya yaitu sebesar 82,97 % dan realisasi alokasi dana tahun 2021 sebesar >80% yaitu 85,12 % dari kebutuhan Kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan keuangan Auditor Independen No. 00044/2.1024/AU.1/01/1119-5/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021,dan 00062/2.1024/AU.1/01/1119-6/1/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 oleh kantor *akuntan public Ojak Lumban Gaol* Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2021 dan *budgeting* tahun 2020 dan 2021. |
| 3. | Verifier 2.6.3 | : | Realisasi alokasi dana yang proporsional |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Buruk** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Proporsionalitas alokasi dana tahun 2020 sebesar 82,97%, dimana Prosentase realisasi alokasi dana terbesar adalah 97,27% (Administrasi umum ) dan yang terkecil adalah *Harvesting (Kayu Round Log)* sebesar 14,31%. Proporsionalitas alokasi dana tahun 2021 sebesar 111,94 %, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dimana dana terbesar sebesar 112,10 % untuk kegiatan Administrasi umum dan terkecil sebesar 0,16% untuk kegiatan *Harvesting (Kayu Round Log)*. |
| 4. | Verifier 2.6.4 | : | Realisasi pendanaan yang lancar |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Telah terealisasi dana kelola hutan >80%, terlihat bahwa kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tetapi beberapa kegiatan dilaksanakan dilapangan belum sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan penanaman dan Land Clearing, dan kegiatan pemanenan. |
| 5. | Verifier 2.6.5 | : | Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Telah terealisasi tanaman pokok budidaya sebesar 99,43 % dari *nett plantable* area tapi belum seluruhnya . *Nett Plantable* yang akan dilaksanakan penanaman yaitu seluas 15.035 Ha dan realisasi tanaman sampai Bulan Desember tahun 2022 seluas 14.949,96 Ha, sehngga tanaman budidaya yang belum tertanam seluas 86 Ha. |
| 6. | Verifier 2.6.6 | : | Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Realisasi penanaman tanaman pokok tahun 2021 dan tahun 2022 dari yang memungkinkan untuk di tanam sebesar antara 50-70% dari target RKT. Beberapa kendala di lapangan yaitu adanya *Land Claim* dari masyarakat dan setiap tahun selalu diusulkan dalam target RKT. |
| Nilai Kinerja Indikator 2.6 | | : | **SEDANG** dengan Nilai mencapai **66,67 %** , tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## C. KRITERIA EKOLOGI

11. Indikator 3.1 :

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.1.1 | : | Luasan kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode 2 tahun terakhir, terdapat perubahan luas kawasan lindung di areal PT Permata Hijau Khatulistiwa. Alokasi kawasan lindung saat ini mengacu pada dokumen RKUPH PT PHK tahun 2021 (periode 2022 – 2031) seluas 2.973,85 Ha, dimana luas ini berkurang 584,15 Ha dari alokasi sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Agmi Bagus K. dan Yohanes Ngiso L. (PIC Ekologi), berkurangnya luas kawasan lindung disebabkan karena pada areal Sempadan Sungai Himba Lestari (234,15 Ha) terdapat klaim dari masyarakat Desa Himba Lestari dan pada areal kawasan lindung terkoneksi Taman Nasional Kutai (350 Ha) tidak lagi dialokasikan sebagai kawasan lindung PT PHK. Jenis kawasan lindung PT PHK menjadi sempadan sungai (1.803,85 Ha), Bufferzone Hutan Lindung (327 Ha), KPPN (300 Ha), dan KPSL (543 Ha).<br><br>Berdasarkan uji petik lapang pada areal KPSL (0˚40'4,277" N 117˚2'12,913" E) dan KPPN (0˚37'43,904" N 117˚2'34,386" E), kondisi biofisik berupa tutupan lahan dan fungsi hutan pada |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | kawasan lindung masih baik dan tidak teridentifikasi adanya gangguan hutan. Namun, pada Sempadan Sungai Himba Lestari (0˚38'55,929" N 117˚0'34,446" E), sebagian areal sempadan cukup terbuka karena ditanam sawit dan dibangun pemukiman oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena mudahnya akses masyarakat di Sempadan Sungai Himba Lestari karena berada di tepi jalan utama. |
| 2. | Verifier 3.1.2 | : | Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Panjang batas kawasan lindung di areal PT Permata Hijau Khatulistiwa sebesar ±309,369 km. Kegiatan penataan batas kawasan lindung dilakukan secara bertahap sesuai rencana tahunan karena akses kawasan lindung yang terbatas. Selama periode 2 tahun terakhir, tidak terdapat penataan batas baru di areal kawasan lindung. Total kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sepanjang 13,7 km (54,23% dari rencana tahunan sebesar 25,263 km). PT PHK telah melaksanakan pemeliharaan batas kawasan lindung pada Sempadan Sungai Jelmuan sebesar 1,1 Km dan pada Sempadan Sungai Loa Merah sepanjang 600 meter.<br>Berdasarkan hasil uji petik pada KPSL (0˚40'4,277" N 117˚2'12,913" E); KPPN (0˚37'43,904" N 117˚2'34,386" E); Sempadan Sungai Jelmuan (0˚35'28,664" N 116˚53'13,671" E); dan Sempadan Sungai Loa Merah (0˚33'13,837" N 116˚54'14,517" E), masing-masing terdapat plang nama dari papan kayu berwarna putih dengan kondisi baik. Patok ikat berupa patok kayu persegi berwarna merah dengan ujung berwarna kuning. Pada Sempadan Sungai Loa Merah ditemukan batas rintis sepanjang 500 meter di sisi selatan sempadan sungai, sedangkan pada areal KPSL, KPPN, dan Sempadan Sungai Jelmuan tidak ditemukan batas rintisan kawasan lindung. |
| 3. | Verifier 3.1.3 | : | Kondisi penutupan kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 (Citra Landsat 7+ ETM Band 542 Path/Row 116/060 Liputan 1 Desember 2022) yang dibuat oleh PT Cendana Bakti Mandiri. Berdasarkan hasil overlay peta penafsiran citra satelit, penutupan kawasan lindung masih didominasi tutupan berhutan (84,61%) dengan komposisi hutan sekunder seluas 266,43 Ha, hutan tanaman tumbuh alami seluas 602,91 Ha, dan sisanya areal belukar tua seluas 1.646,83 Ha.<br>Berdasarkan observasi pada areal KPSL (0˚40'4,277" N 117˚2'12,913" E) dan KPPN (0˚37'43,904" N 117˚2'34,386" E), tutupan lahan cukup rapat berupa hutan sekunder dan belukar tua. Pada Sempadan Sungai Jelmuan (0˚35'28,664" N 116˚53'13,671" E), tidak teridentifikasi gangguan hutan namun penutupan lahan cukup terbuka berupa belukar tua dan semak. Penutupan hutan bagian dalam sempadan berupa hutan sekunder kerapatan sedang. Sementara itu, pada Sempadan Anak Sungai Sangatta/Himba Lestari (0˚38'55,929" N 117˚0'34,446" E), sebagian areal sempadan telah dibuat kebun sawit dan dibangun pemukiman oleh masyarakat karena aksesnya cukup terbuka. Begitupun pada Sempadan Sungai Loa Merah (0˚33'13,837" N 116˚54'14,517" E), dimana sebagian areal sempadan cukup terbuka akibat pembukaan lahan untuk mess PKWT. Pada bagian dalam sempadan, tutupan lahan berupa hutan sekunder dan belukar. PT PHK telah melakukan pengayaan pada kawasan lindung dengan jenis Durian, Kapur, Rambai, dan Meranti sebanyak 950 bibit (2,37 Ha). |
| 4. | Verifier 3.1.4 | : | Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **N/A** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Areal PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak memiliki jenis kawasan lindung berupa ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan ekosistem gambut dan verifier ini tidak dapat diterapkan (*Not Applicable*). |
| 5. | Verifier 3.1.5 | : | Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi |
| | Bobot | : | **CD** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki 2 (dua) desa binaan, yakni Desa Himba Lestari dan Desa Mawai Indah. Dalam upaya mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung dari masyarakat, PT PHK telah mengadakan sosialisasi terpadu yang didalamnya turut memberikan materi mengenai kawasan lindung. Sosialisasi telah dilakukan pada kedua desa pada tahun 2021 dan 2022. Sosialisasi ini menghasilkan output berupa *Berita Acara Pengakuan Keberadaan Kawasan Lindung PT Permata Hijau Khatulistiwa tanggal 3 Maret 2022* yang ditandatangani dan distempel oleh Firmansyah (Kades Himba Lestari) dan Robert Andriansyah P. (Kades Mawai Indah).<br>Dalam rangka mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung dari karyawan, PT PHK telah mengadakan sosialisasi pada karyawannya secara rutin, seperti melalui *safety induction* maupun sosialisasi terkait kebijakan lingkungan yang pernah diselenggarakan tanggal 21 Juli 2022. Meskipun begitu, selama periode 2 tahun terakhir, masih terdapat gangguan di kawasan lindung berupa perambahan di Sempadan Sungai Himba Lestari yang menyebabkan berkurangnya luas kawasan lindung 234,15 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengakui keberadaan kawasan lindung yang seharusnya dijaga dan dipertahankan fungsinya. |
| 6. | Verifier 3.1.6 | : | Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode 2 tahun terakhir, PT PHK telah melakukan pengelolaan kawasan lindung dan dituangkan pada berita acara/laporan kegiatan, seperti: 1) Berita acara patroli dan pengecekan patok batas kawasan lindung Sempadan Sungai Jelmuan dan Sempadan Sungai Loa Merah; 2) BA Pengayaan Tanaman di Kawasan Sempadan Sungai Jelmuan dan Sempadan Sungai Loa Merah; 3) Laporan Identifikasi Flora Fauna Semester II tahun 2021; 4) Laporan Identifikasi Flora Fauna Semester I tahun 2022; dan 5) Laporan Identifikasi Flora Fauna Semester II tahun 2022. PT PHK juga telah membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL secara rutin pada KPHP Bengalon Kab. Kutai Timur, Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, BPHP Wil. XI Kaltim, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur. Pada periode 2 tahun terakhir, PT PHK belum menyediakan laporan penataan batas kawasan lindung, baik pada KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, maupun Bufferzone Hutan Lindung. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.1 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai **74,07%,** tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

12. Indikator 3.2 :
    Perlindungan dan pengamanan hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.2.1 | : | Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Potensi gangguan hutan di areal PT Permata Hijau Khatulistiwa diantaranya perambahan kawasan, pencurian kayu (pembalakan liar), perburuan satwa liar, hama dan penyakit tanaman, dan kebakaran hutan. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | PT PHK telah menyiapkan prosedur untuk mencegah dan mengatasi gangguan hutan diatas. Selama periode 2 tahun terakhir, tidak terdapat revisi terhadap prosedur yang tersedia, diantaranya: 1) Prosedur Penanganan Klaim, Tuntutan, Bantuan dan Pembalakan Liar (No. 001-PHK-SSL-SOP tanggal 1 Desember 2016); 2) Prosedur Penyelesaian Konflik lahan (No. 018-PHK-SSL-SOP tanggal 1 November 2018); 3) Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. 021-PHK-SSL-SOP tanggal 3 Desember 2018); 4) Prosedur Monitoring Hama Penyakit (No. 001-PHK-RND-SOP Tanggal 1 Desember 2016); Prosedur Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran (No. 017-PHK-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016); dan sebagainya. Prosedur yang tersedia telah secara jelas mengatur mekanisme pencegahan dan/atau penanganan gangguan hutan dengan disertai rujukan/aturan terkait. |
| 2. | Verifier 3.2.2 | : | Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan data sarana prasarana dalkarhutla PT PHK (per Januari 2023) yang didukung dengan uji petik lapangan, ketersediaan sarpras dalkarhutla masih kurang dari ketentuan PermenLHK P.32 tahun 2016 untuk kebutuhan 2 regu inti (30 personil), diantaranya seperti : helm pemadam berjumlah 15 buah (kurang 15 buah); lampu kepala 20 buah (kurang 10 buah); baju pemadam tahan api 3 buah (kurang 27 buah); sarung tangan tahan panas 15 buah (kurang 15 buah); dan sebagainya. Bangunan menara api tersedia sebanyak 4 buah, namun yang masih berfungsi dengan baik hanya 1 buah (pada koordinat 0˚35'28,664" N 116˚53'13,671" E). Pada areal PT PHK telah terpasang plang-plang perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup dan pada lokasi yang mudah terlihat/strategis. Sementara itu, sarpras security yang tersedia telah mencukupi kebutuhan 15 personik, diantaranya : mobil patroli 2 unit, motor patroli 1 unit, Radio Rig 3 unit, Handy Talkie 2 unit, Borgol 13 unit, Tongkat T 13 unit, dan Rompi 13 unit. PT PHK juga telah menyediakan portal dan pos penjagaan di lokasi masuk perusahaan serta mess security. |
| 3. | Verifier 3.2.3 | : | SDM perlindungan hutan |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni personil dalkarhutla dan personil security. Berdasarkan ketentuan PermenLHK No. P.32 tahun 2016, izin pengusahaan hutan tanaman dengan luas >20.000 s.d ≤40.000 Ha (luas PT PHK 26.345 Ha) wajib memiliki minimal 2 regu inti dalkarhutla (15 personil/regu).<br>PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki 2 Regu Inti Dalkarhutla berjumlah masing-masing 15 personil, Regu Pendukung Dalkarhutla dengan 1 ketua tim dan anggota seluruh karyawan, serta Regu Perbantuan Dalkarhutla berupa Masyarakat Peduli Api/MPA dari Desa Mawai Indah (15 orang) dan Desa Beno Harapan (15 orang). Seluruh personil regu inti dalkarhutla telah memiliki sertifikat kompetensi dalkarhutla Manggala Agni. Sementara itu, personil security PT PHK merupakan tenaga *outsourcing* dari PT Satria Elang Nusantara (PT SEN) berjumlah 14 orang. Seluruh personil security telah memiliki kompetensi pengamanan hutan Gada Pratama. PT PHK juga telah bekerjasama dengan Brimob Polda Kaltim dalam kegiatan pengamanan hutan. |
| 4. | Verifier 3.2.4 | : | Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode 2 tahun terakhir, pada areal konsesi PT PHK terdapat beberapa gangguan hutan, diantaranya kebakaran hutan sebanyak 5 kali di dalam konsesi akibat pembukaan ladang oleh masyarakat dengan luas total 7,5 Ha; *illegal logging* dengan jenis ulin dan jenis lainnya; serta klaim lahan oleh masyarakat (data klaim terbaru seluas 1.671,2 Ha). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Upaya penanganan yang dilakukan oleh PT PHK diantaranya: 1) Upaya preemtif melalui sosialisasi perlindungan hutan pada Desa Mawai Indah, Desa Himba Lestari, dan pada karyawan; 2) Upaya preventif melalui monitoring hotspot (ditemukan sebanyak 7 titik hotspot selama tahun 2021 dan 5 titik hotspot tahun 2022) dan dilakukan *groundcheck* lapangan, training internal bagi regu dalkarhutla, pemantauan papan peringkat bahaya kebakaran (*Fire Danger Rating*), patroli oleh tim security setiap hari, penjagaan di pos jaga security 24 jam; dan 3) Upaya represif melalui pemadaman kebakaran hutan yang terjadi, pelaporan dalkarhutla bulanan secara rutin melalui website SIPONGI (https://sipongi.menlhk.go.id/), penyampaian langsung laporan dalkarhutla ke instansi : Balai PPI/Manggala Agni Karhutla Wil. Daops Sangkima Kab. Kutai Timur, UPT KPHP Bengalon Kab. Kutai Timur, dan Polsek Kec. Muara Bengkal, melakukan penyitaan kayu curian dan barang bukti lain, bekerjasama dengan Brimob Polda Kaltim, dan melakukan program kemitraan bersama masyarakat (PHBM) dan program ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) untuk menekan klaim lahan. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.2 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **91,67%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

13. Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.3.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Jenis dampak besar dan penting terkait dampak tanah dan air yang perlu dikelola akibat kegiatan pengusahaan PT Permata Hijau Khatulistiwa diantaranya kondisi sifat fisik-kimia tanah, kualitas udara ambien, erosi tanah, kuantitas dan kualitas air, sedimentasi, serta penurunan kualitas habitat dan keanekaragaman biota air. Dalam upaya mencegah dan mengatasi timbulnya dampak tersebut, PT PHK telah menyediakan beberapa prosedur, seperti: 1) SOP Pemantauan Erosi Tanah (No. 004-PHK-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016, Rev. 1 tanggal 2 Desember 2021); 2) SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah Non-B3 (No. 008-PHK-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016, Revisi Ke-1 tanggal 2 Desember 2021); 3) SOP Pedoman Pemantauan Karakteristik Air Sungai (No. 018-PHK-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016); 4) SOP Pedoman Penyimpanan Limbah B3 (No. 009-PHK-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016, Revisi Ke-1 tanggal 2 Desember 2021); dan sebagainya. Seluruh prosedur telah mengatur teknis pemantauan dan pengelolaan terhadap jenis dampak potensial dan disertai rujukan terkait. |
| 2. | Verifier 3.3.2 | : | Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menyediakan beberapa sarana prasarana pendukung, diantaranya: 1) Ombrometer 1 buah (0˚41'40,341" N 116˚54'52,112"E); 2) Alat ukur suhu dan kelembaban udara; 3) Stik pengukur tinggi muka air 2 buah pada Sungai Jelmuan (0˚34'7,907" N 116˚54'39,766" E) dan Sungai Loa Merah (0˚32'27,804" N 116˚53'30,944"E); 4) Stik ukur erosi pada blok RKT 2021 (0˚35'55,104" N 116˚56'19,079"E) dan pada blok RKT 2022 (0˚37'36,249" N 116˚56'34,524" E).<br>Sarana prasarana pengelolaan limbah PT PHK belum optimal, yakni TPS Limbah B3 (0˚32'28,807" N 116˚53'30,615" E) belum fungsional dan belum ada izin pendirian sehingga penyimpanan, pelaporan, dan pengangkutan limbah masih bergabung secara keseluruhan dengan TPS Limbah B3 PT MPS. Penempatan TPA sampah pada camp BIE PT PHK (0˚31'59,431" N 116˚52'52,603" E) belum sesuai karena sangat dekat dengan pemukiman (mess PKWT) serta |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | PT PHK belum bekerjasama dengan DLH setempat maupun desa sekitar untuk pengelolaan lanjutan dari sampah yang terkumpul. |
| 3. | Verifier 3.3.3 | : | SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air, PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki staf/tenaga kelola lingkungan sejumlah 7 personil. Sebagian personil telah mengikuti pelatihan terkait pengendalian dampak tanah dan air, yakni pelatihan Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) atas nama Roni Rizali dan pelatihan Operational Pengelolaan Limbah B3 (OPLB3) atas nama Agmi Bagus Kartiko. Sebagian personil juga merupakan lulusan sarjana kehutanan yang kompeten dalam kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai jenjang pendidikan formal.<br>PT PHK juga telah memiliki personil GANISPHPL-BINHUT atas nama Yohanes Ngiso Logha (No. Register 03210016248, Persetujuan Penugasan GANISPH No. 111121043 tanggal 17 November 2021, masa berlaku penugasan: 17 November 2021 s.d 17 November 2024). |
| 4. | Verifier 3.3.4 | : | Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT Permata Hijau Khatulistiwa tertuang dalam Dokumen RKL tahun 2010. Selama periode 2 tahun terakhir, poin-poin implementasi pengelolaan dampak tanah dan air PT PHK diantaranya: 1) Kegiatan penyaradan telah menggunakan alat mekanis dengan jalur ekstraksi sehingga meminimalisir tingkat pemadatan tanah; 2) Penanaman kembali secepatnya pada tahun yang sama di areal bekas tebangan; dan 3) Melaksanakan pemeliharaan dan pengerasan jalan angkutan.<br>Kegiatan pengelolaan dampak tanah dan air yang belum diimplementasikan secara optimal diantaranya: 1) Belum melaksanakan pengayaan dengan jenis tanaman penghalang debu dan belum ada upaya mengurangi dampak debu akibat kegiatan pengangkutan kayu; 2) Kegiatan pengelolaan sampah belum optimal yakni penempatan TPA sampah terlalu dekat dengan pemukiman serta belum bekerjasama dengan DLH setempat atau desa sekitar untuk pengelolaan lanjutan dari sampah yang terkumpul; 3) Dalam pengelolaan limbah B3, bangunan TPS Limbah B3 PT PHK belum fungsional dan belum ada izin pendirian sehingga kegiatan penyimpanan, pelaporan, dan pengangkutan limbah masih bergabung secara keseluruhan dengan PT MPS. |
| 5. | Verifier 3.3.5 | : | Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Permata Hijau Khatulistiwa tercantum dalam Dokumen RPL tahun 2010. Selama periode 2 tahun terakhir, PT PHK telah melaksanakan seluruh kegiatan pemantauan sesuai rencana, diantaranya: 1) Pemantauan uji kualitas tanah pada blok RKT tahun berjalan (per semester); 2) Pemantauan uji kualitas udara *ambient* pada basecamp, Kantor Desa Mawai Indah, serta Desa Batu Balai per semester; 3) Pemantauan erosi secara rutin di blok RKT 2021 dan blok RKT 2022; 4) Pemantauan debit air sungai pada Sungai Jelmuan dan Sungai Loa Merah (per semester); 5) Uji kualitas air dan uji biota air secara rutin pada Cek DAM Mawai Indah, Sungai Jelmuan Hulu, Sungai Jelmuan Hilir, Sungai Loa Merah Hulu dan Hilir, Sungai Sangatta, dan Sungai Himba Lestari; serta 6) Pemantauan tingkat kebisingan di depan kantor PT PHK (Camp BIE) dan Kantor Desa Mawai Indah. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Verifier 3.3.6 | : | Dampak terhadap tanah dan air |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil uji kualitas air di Sungai Jelmuan Hulu dan Hilir, Sungai Loa Merah Hulu dan Hilir, Sungai Sangatta, dan Sungai Himba Lestari pada periode pengamatan 2 tahun terakhir, menunjukkan bahwa parameter dominan kualitas air masih berada dalam batas baku mutu perairan sungai sesuai PP RI No. 22 tahun 2021 dan tidak ada indikasi pencemaran sungai.<br>Ada/tidaknya dampak terhadap tanah dan air juga dapat dilihat melalui teknis pengelolaan limbah yang dilakukan, karena limbah merupakan faktor yang secara langsung menjadi penyebab adanya dampak negatif terhadap tanah dan air. Dalam pengelolaan limbah B3, PT PHK belum memfungsikan TPS Limbah B3 dan belum memiliki izin pendirian limbah B3. Selain itu, kegiatan pengelolaan sampah belum optimal yakni penempatan TPA sampah terlalu dekat dengan pemukiman serta belum bekerjasama dengan DLH setempat atau desa sekitar untuk pengangkutan/ pengelolaan lanjutan dari sampah yang terkumpul. Implementasi pembuangan sampah juga masih tercampur antara organik dan anorganik. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.3 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **83,33%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

14. Indikator 3.4 :

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.4.1 | : | Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna (No. 019-PHK-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 2018, Revisi ke-1 tanggal 2 Desember 2021). Identifikasi flora dan fauna dilakukan setiap 1 tahun sekali pada kawasan lindung dan areal produksi dengan metode jalur di areal kawasan lindung. Identifikasi fauna dilakukan minimal 1 kali/tahun pada kawasan lindung dan areal produksi. Identifikasi fauna telah diklasifikasikan berdasarkan jenisnya (burung, mamalia dan reptilia). Pengamatan dilakukan secara langsung (*direct observation*) dengan plot contoh berupa jalur/ transek dan perjumpaan tidak langsung melalui jejak, suara, kotoran, sarang, dan sebagainya. Hasil identifikasi dibuatkan pelaporan dan disampaikan ke instansi terkait. Prosedur telah merujuk pada aturan *P.106*/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/*2018*, Appendices CITES, dan IUCN Red List terkait jenis-jenis flora dan fauna dilindungi. |
| 2. | Verifier 3.4.2 | : | Implementasi kegiatan identifikasi |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode 2 tahun terakhir, PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang didokumentasikan dalam Laporan Identifikasi Flora Fauna Semester II tahun 2021, Laporan Identifikasi Flora Fauna Semester I tahun 2022, dan Laporan Identifikasi Flora Fauna Semester II tahun 2022. Meskipun begitu, hasil identifikasi flora dan fauna belum dilakukan inventarisasi populasi sampai dengan indeks keanekaragaman jenis, indeks kekayaan jenis, dan indeks kemerataan jenis untuk mengetahui tingkat keanekaragaman dan sebaran jenis satwa di areal konsesi. Hal ini juga menjadi dasar untuk mengetahui tren kondisi satwa setiap tahunnya. Kegiatan identifikasi belum mempertimbangkan intensitas sampling (keterwakilan plot/petak identifikasi) sehingga hasil identifikasi flora-fauna dilindungi belum mewakili areal.<br>PT PHK juga telah memiliki Laporan Monitoring Terpadu KBKT dan Konservasi Habitat Orangutan tahun 2020 yang bekerjasama dengan Ecositrop. Dokumen ini telah menginventarisasi flora dan fauna dilindungi yang masih eksis di kawasan lindung dan telah diklasifikasikan status konservasinya berdasarkan peraturan yang berlaku (CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK P.106/2018). |
| Nilai Kinerja Indikator 3.4 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **83,33%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

15. Indikator 3.5 :
    Pengelolaan flora untuk :
    a) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
    b) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.5.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-PHK-EHS-SOP Tanggal Terbit 1 November 2018, Revisi ke-1 tanggal 2 Januari 2020). Pengelolaan flora dan fauna dilindungi dilakukan melalui pengelolaan *in-situ* dan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar.<br>Teknis kegiatan pengelolaan flora dilindungi dalam prosedur diantaranya: identifikasi flora secara berkala (1 kali/tahun) dan diklasifikasikan berdasarkan kategori konservasinya; Perlindungan habitat alami flora melalui alokasi kawasan lindung; Pengelolaan kawasan lindung melalui penandaan batas kawasan lindung, penanaman, dan pemasangan papan informasi kawasan lindung; Patroli pengamanan kawasan lindung terhadap kegiatan perambahan dan *illegal logging*; Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat terkait perlindungan dan larangan pemanfaatan flora dilindungi di areal konsesi; dan pengelolaan dan pemantauan HCV. Prosedur telah merujuk pada PermenLHK No. P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List. |
| 2. | Verifier 3.5.2 | : | Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Implementasi pengelolaan flora dilindungi PT PHK selama periode 2 tahun terakhir diantaranya: melakukan identifikasi flora dilindungi di areal KPPN dan areal produksi; pemeliharaan batas kawasan lindung dan pemasangan plang terkait perlindungan hutan; patroli hingga menjangkau kawasan lindung oleh tim security serta regu dalkarhutla; sosialisasi perlindungan flora pada karyawan maupun masyarakat; melaksanakan pemantauan HCV/ABKT bekerjasama dengan Ecositrop sesuai Laporan *Monitoring Terpadu KBKT dan Konservasi Habitat Orangutan Tahun 2020* (Data monitoring KBKT berlaku selama 3 tahun). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang belum dilaksanakan secara optimal diantaranya: 1) Selama periode 2 tahun terakhir, kegiatan penataan batas kawasan lindung belum dilaksanakan; 2) Sosialisasi terkait perlindungan flora ke masyarakat belum menyeluruh sehingga belum dapat mengurangi intensitas gangguan pada flora dilindungi dan habitatnya (perladangan, klaim lahan, dan *illegal logging*). |
| 3. | Verifier 3.5.3 | : | Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada areal kawasan lindung PT Permata Hijau Khatulistiwa, masih terdapat gangguan pada flora dilindungi dan habitatnya, diantaranya:<br>- Berdasarkan laporan patroli oleh security, masih terdapat kegiatan *illegal logging* berupa 3 kali pencurian kayu Ulin (*Eusideroxylon zwageri*) di areal konsesi PT PHK. Meskipun Ulin tidak dikategorikan jenis dilindungi dalam PermenLHK P.106 tahun 2018, namun Ulin masih tergolong Rentan Punah (*Vulnerable*/VU) sesuai daftar merah IUCN. Oleh sebab itu, pengambilan kayu Ulin harus diawasi dan dibatasi.<br>- Menurut Laporan Pemetaan Konflik Semester II tahun 2022 yang didukung dengan observasi lapang, terdapat areal klaim pada kawasan lindung SS. Himba Lestari seluas 208,2 Ha. Klaim ini menyebabkan kawasan lindung tersebut berubah fungsi menjadi pemukiman dan lokasi perladangan (jenis sawit, sahang, dsb.) sehingga tidak lagi dapat mendukung habitat flora dilindungi.<br>Upaya yang dilakukan oleh PT PHK untuk menekan gangguan flora diantaranya melalui patroli rutin, menjalin kemitraan dengan masyarakat, dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait (Brimob Polda Kaltim dan Dinas Kehutanan) dalam kegiatan perlindungan hutan. |
| Nilai Kinerja Indikator 3.5 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai **77,78%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

16. Indikator 3.6 :

Pengelolaan fauna untuk :

a) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.

b) Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 3.6.1 | : | Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Baik** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-PHK-EHS-SOP Tanggal Terbit 1 November 2018, Revisi ke-1 tanggal 2 Januari 2020). Pengelolaan flora dan fauna dilindungi dilakukan melalui pengelolaan *in-situ* dan penanggulangan konflik manusia dan satwa liar.<br>Prosedur pengelolaan fauna dilindungi diantaranya : identifikasi fauna secara berkala (1 kali/tahun) dan diklasifikasikan berdasarkan kategori konservasinya; Alokasi kawasan lindung dan pengelolaannya melalui penandaan batas kawasan lindung, penanaman, dan pemasangan papan informasi kawasan lindung; Patroli kawasan lindung terhadap kegiatan perambahan dan pencurian satwa dilindungi; Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat terkait perlindungan fauna; dan pengelolaan dan pemantauan HCV. Prosedur telah merujuk pada PermenLHK No. P.106 tahun 2018, Appendices CITES, dan IUCN Red List. Selain prosedur ini, terdapat prosedur terkait pengelolaan satwa lainnya, diantaranya SOP Penanganan Satwa Liar (No. 012-PHK-EHS- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | SOP tanggal 1 Desember 2016) dan SOP Panduan Teknis Penanganan dan Penyelamatan Orangutan (No.020-PHK-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016). |
| 2. | Verifier 3.6.2 | : | Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Implementasi pengelolaan fauna dilindungi PT Permata Hijau Khatulistiwa selama periode 2 tahun terakhir diantaranya: alokasi kawasan lindung; pemasangan plang larangan perburuan dan perlindungan hutan lainnya; patroli pengamanan hutan; pengayaan tanaman pada kawasan lindung dengan jenis Durian, Kapur, Rambai, dan Meranti sebanyak 950 bibit (2,37 Ha); dan monitoring ABKT bekerjasama dengan Ecositrop. Kegiatan pengelolaan fauna yang belum optimal diantaranya: 1) Penandaan batas kawasan lindung belum dilakukan selama 2 tahun terakhir; 2) Sosialisasi terkait perlindungan fauna ke masyarakat belum menyeluruh sehingga belum dapat mengurangi intensitas gangguan pada fauna dilindungi (perladangan, klaim lahan); serta 3) Belum ada kegiatan monitoring dan penanganan konflik satwa dan manusia di lapangan. |
| 3. | Verifier 3.6.3 | : | Kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik |
| | Bobot | : | **D** |
| | Nilai | : | **Sedang** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada areal PT Permata Hijau Khatulistiwa masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan habitatnya. Berdasarkan Laporan Pemetaan Konflik Semester II tahun 2022 yang didukung dengan observasi lapang, terdapat klaim pada kawasan lindung Sempadan Sungai Himba Lestari seluas 208,2 Ha yang menyebabkan kawasan lindung tersebut berubah fungsi menjadi pemukiman dan lokasi perladangan (jenis sawit, sahang, nanas) sehingga tidak lagi dapat mendukung habitat fauna dilindungi.<br>Berdasarkan wawancara Auditor Sosial (An. Ir. Wasis Kuncoro) dengan Bapak Ruslan (Sekdes Himba Lestari); Bapak Eko (Kepala Urusan Pemerintahan Himba Lestari); dan Bapak Hasan Basri (Ketua Kelompok Tani Lestari Indah), masyarakat sekitar sudah tidak melakukan perburuan karena sudah tidak ada binatang buruan di areal PT PHK. Meskipun begitu, berdasarkan informasi dari warga (petani nanas) di Desa Himba Lestari, beberapa bulan yang lalu di tahun 2022 terjadi konflik antara satwa Orangutan dengan masyarakat, yakni Orangutan masuk ke perkebunan nanas milik masyarakat dan memakan hasil perkebunan nanas tersebut. PT PHK belum melaksanakan monitoring konflik antara manusia dengan satwa liar serta belum melakukan upaya penanganannya (sesuai SOP Panduan Teknis Penanganan dan Penyelamatan Orangutan No. 020-PHK-EHS-SOP tanggal 1 Desember 2016 dan SOP Penanganan Satwa Liar No. 012-PHK-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 2016). |
| Nilai Kinerja Indikator 3.6 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai **77,78%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## D. KRITERIA SOSIAL

17. Indikator 4.1 :
Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang Izin dengan Kawasan Masyarakat Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1 | : | Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin |
| | Bobot | : | **Dominan** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PHK telah memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam Peta Sebaran Desa yang berada di dalam Areal PT PHK; Peta Pengunaan Areal di Luar Sektor Kehutanan PBPH PT PHK skala 1 : 125.000; Kajian Kekinian Aspek Sosial (*Social Mapping*) Pada Wilayah HTI PT PHK (2019); Laporan Pemetaan Konflik/Klaim Lahan PT PHK Tahun 2021 & 2022.<br>Pada periode Penilikan ke-2, rencana pemanfaatan SDH oleh PT PHK dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2012-2021 & RKUPH periode tahun 2022 - 2031; RKTUPHHK–HTI Tahun 2021 & RKTPH Tahun 2022; dan untuk rencana kelola sosial dituangkan dalam *Project Plan Comdev* PT PHK Tahun 2021 & 2022 yang telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. |
| 2. | Verifier 4.1.2 | : | Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif; SOP Penanganan Klaim, Tuntutan, Bantuan dan Pembalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan telah diimplementasikan dalam penataan batas partisipatif batas desa sekitar dan penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan. |
| 3. | Verifier 4.1.3 | : | Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK telah memiliki mekanisme yang **lengkap, legal dan jelas** terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Pengakuan Hak-hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat, SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), SOP Studi Dampak Sosial (SDS) dan SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja serta telah diimplementasikan dalam Rekruitmen Tenaga Kerja, Pemanfaatan HHNK, Kesepakatan/MoU Kemitraan dengan masyarakat sekitar (Tahun 2021 - 2022 ada 3 MoU Kerjasama Kemitraan antara PT PHK dengan Desa Mawai Indah dan Himba Lestari) dan Program Kelola Sosial lainnya. |
| 4. | Verifier 4.1.4 | : | Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK telah melakukan Penataan Batas wilayah Desa Batu Timbau dan Mawai Indah berdasarkan Peraturan Bupati Kutim No. 24 Tahun 2020 dan PT PHK telah melakukan Batas Kemitraan PHBM dengan masyarakat (Mawai Indah, Himba Lestari dan Batu Balai) serta telah melakukan identifikasi Pengunaan Areal di Luar Sektor Kehutanan oleh masyarakat sekitar seluas 2.394 Ha, berupa Kebun, Sawit, lada dan Pemukiman.<br>Di dalam areal PT PHK terdapat areal APL berupa wilayah desa (yaitu desa Mawai Indah dan Himba Lestari), namun batas wilayah tersebut sampai pelaksanaan audit **belum seluruhnya dilakukan** penataan batasnya secara partisipatif.<br>Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT PHK memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat. |
| 5. | Verifier 4.1.5 | : | Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode Penilikan ke-2, PT PHK dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) hal ini dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK-HTI PT PHK, telah disetujuinya Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2012 – 2021 & RKUPH Periode 2022-2031 dan RKTUPHHK-HTI PT PHK Tahun 2021 & Tahun 2022, serta tersedia Berita Acara Kesepakatan Dukungan Desa Mawai Indah & Desa Himba Lestari terhadap PT PHK Tahun 2021-2022 dan BA Sosialisasi Terpadu PT PHK dengan Masyarakat Desa Mawai Indah & Himba Lestari Tahun 2021-2022.<br><br>Hasil Wawancara dengan Wakil masyarakat sekitar areal diperoleh informasi bahwa masyarakat mengetahui kegiatan operasional PT PHK dan mendukung selama masih sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat serta sebagian masyarakat sekitar telah melakukan kerjasama kemitraan melalui program PHBM.<br><br>Pada areal PT PHK masih terdapat potensi konflik klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan terdapat upaya dari PT PHK untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui Kerjasama Kemitraan dan Pembayaran GRTT. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.1 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **93,33 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

18. Indikator 4.2 :
Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.2.1 | : | Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, Revisi RKUPHHK-HTI Periode tahun 2012 – 2021 & RKUPH Periode 2022-2031, RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 & RKTPH Tahun 2022, *Project Plan Comdev* Tahun 2021 & 2022, Laporan Semesteran Comdev/Kelola Sosial Tahun 2021 & 2022 dan terdapat 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kemitraan dengan 2 (desa) desa sekitar.<br>Hasil telaahan terhadap dokumen tanggung jawab sosial PT PHK yang tersedia, kegiatan Comdev/kelola sosial yang direncanakan dalam *Project Plan Comdev* Tahun 2021 & 2022 **tidak sinkron** dengan rencana kegiatan Comdev/kelola sosial Tahun 2021 & 2022 yang ada dalam RKT serta realisasi kegiatan kelola sosial/CD masih belum optimal. |
| 2. | Verifier 4.2.2 | : | Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT. PHK memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan telah diimplementasikan. |
| 3. | Verifier 4.2.3 | : | Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi yang dilengkapi daftar hadir (terdapat Laporan Sosialisasi Terpadu PT PHK di Desa Mawai Indah bertempat di Kator Desa Mawai Indah dan di Desa Himba Lestari).<br>Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, diperoleh informasi bahwa PT PHK telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait Kegiatan operasional PT PHK Tahun 2021 & 2021, akan tetapi PT PHK **tidak menjelaskan secara khusus** terkait rencana/program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa binaan |
| 4. | Verifier 4.2.4 | : | Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK memiliki dokumen realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT PHK terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat Tahun 2021 & 2022.<br>Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden (wakil masyarakat sekitar areal), diperoleh informasi bahwa PT PHK telah merealisasikan **sebagian** pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH, realisasi kegiatan kelola sosial/Comdev PT PHK terhadap masyarakat sekitar **masih belum optimal** dan baru dirasakan oleh sebagian masyarakat). |
| 5. | Verifier 4.2.5 | : | Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia dan sesuai SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, Laporan Kelola Sosial/CSR dibuat secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, PT PHK telah membuat dan menyampaikan laporan Comdev kepada instansi terkait/Dinas Kehutanan & KPHP (yang dilengkapi bukti tanda terima).<br>PT PHK memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Realisasi Comdev/Kelola Sosial PT PHK Tahun 2020, BA Serah Terima Bantuan/Sumbangan tahun 2021 & 2022, serta bukti-bukti lainnya (kuitansi, dokumentasi dan fisik), **tersedia lengkap.** |
| Nilai Kinerja Indikator 4.2 | | : | **SEDANG** dengan nilai mencapai **80,00 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

19. Indikator 4.3 :
Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.3.1 | : | Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode Penilikan ke-2, PT PHK memiliki data dan informasi terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam dokumen : Revisi RKUPHHK-HT PT PHK periode 2012 - 2021 & RKUPH periode 2022 - 2031, Realisasi Kegiatan Comdev & BAST Bantuan/sumbangan PT PHK Tahun 2021 & 2022, Daftar Karyawan dan Kontraktor, Identifikasi Klaim lahan oleh masyarakat sekitar dan Kajian Kekinian Aspek Sosial (*Social Mapping*) Pada Wilayah Hutan Tanaman Industri PT PHK Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur (Tahun 2019). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PHK memiliki **data dan informasi yang lengkap** terkait masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. |
| 2. | Verifier 4.3.2 | : | Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT. PHK memiliki mekanisme yang **legal dan lengkap** terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam : SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR, SOP Pelaksanaan Program, SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK), SOP Sosialisasi Terpadu, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). |
| 3. | Verifier 4.3.3 | : | Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HTI PT PHK Periode 2012 - 2021 & RKUPH periode 2022 - 2031, RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 & 2022, *Project Plan ComDev* PT PHK Tahun 2021 & 2022 dan MoU Kemitraan dengan Masyarakat sekitar areal (Tahun 2021 & 2022 terdapat 3 MoU PHBM).<br>Hasil telaahan terhadap dokumen rencana kelola sosial/CD yang terdapat dalam *Project Plan Comdev* PT PHK Tahun 2021 & 2022 **tidak sinkron** dengan rencana kelola sosial yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HT PT PHK Tahun 2021 & 2022, serta Realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar PT PHK Tahun 2021-2022, belum sesuai dengan yang direncanakan<br>PT PHK memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun **belum lengkap dan belum sesuai** dengan yang direncanakan. |
| 4. | Verifier 4.3.4 | : | Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pendekatan Implementasi kegiatan **peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi** PT PHK terhadap masyarakat sekitar :<br>1. Dalam Realisasi Kelola Sosial/CSR PT PHK Tahun 2021 & 2022, atau rata-rata sebesar **40,28 %.**<br>2. Kerjasama Kemitraan realisasi 3 dari rencana 7 kemitraan, atau sebesar **42,86** %<br>3. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Tahun 2021 & 2022, atau rata-rata sebesar **53, 90 %**<br>4. Pemanfaatan kontraktor dari lokal, atau sebesar **20,00 %**<br>Nilai Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT PHK sebesar :<br>(40,28 + 42,86 + 53,90 +20,00) % : 4 **= 157,04 : 4 = 39,26 % ( < 50 %)** |
| 5. | Verifier 4.3.5 | : | Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT. PHK memiliki **bukti yang lengkap** laporan/dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Realisasi Kegiatan Comdev, Pembayaran Tali Asih/Ganti Rugi, Rental Unit, Pembayaran Upah kepada Kontraktor/Borongan dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku (seperti Pembayaran PBB, PPh, PPN dan BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan) dan terdokumentasi dengan baik. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.3 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **86,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

20. Indikator 4.4 :
Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.4.1 | : | Tersedianya mekanisme resolusi konflik |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK telah memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik tertuang dalam SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan telah merujuk pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi sebagai referensi.<br>Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT PHK dan wakil masyarakat, selama ini PT PHK dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pihak Perusahaan selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik. |
| 2. | Verifier 4.4.2 | : | Tersedia peta konflik |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode Penilikan ke-2, PT PHK telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah (klaim lahan) yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2021 & 2022 yang dilengkapi dengan Peta Monev Konflik serta Peta Sebaran Desa yang berada di dalam areal PBPH PT PHK dan Peta Status Lahan.<br>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PHK pada Tahun 2021 telah menyelesaikan klaim lahan seluas 442,0 Ha dan pada Tahun 2022 menyelesaikan seluas 60,1 Ha. Pada akhir Tahun 2022 sisa 5 kasus klaim lahan seluas 1,671,2 Ha , areal klaim tersebut masih terus diupayakan penyelesaian dengan Pola Kemitraan atau GRTT.<br>PT PHK telah menyusun Identifikasi dan Pemetaan konflik klaim lahan terkait isu dominan serta para pihak yang terlibat, dan telah ditindaklanjuti sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, serta melaporkan kepada UPTD KPHP Bengalon dan Dinas Kehutanan Prov.Kaltim (terdapat bukti tanda terima), **akan tetapi tidak tersedia bukti pengiriman dokumen ke BPHL Wil. XI Samarinda.** |
| 3. | Verifier 4.4.3 | : | Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasar SK Direksi PT PHK No: 01/DIR/PHK/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 & No: 01/DIR/PHK/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik, di Tingkat Estate penanggung jawab resolusi konflik adalah Manager SSL dibantu SSL Estate dan Litigation serta mengikutsertakan Stake Holder setempat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | PT PHK telah **memiliki Struktur** atau Lembaga Penyelesaian Konflik dengan SDM yang cukup dalam penanganan konflik yang timbul dengan mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam hal ini Kepala Desa, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Instansi terkait lainnya dalam menangani kasus atau konflik yang timbul, serta didukung dengan **pendanaan yang memadai** dalam mengelola konflik dengan tersedianya Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT PHK Tahun 2021 & Tahun 2022. |
| 4. | Verifier 4.4.4 | : | Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK memiliki dokumen/laporan terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi pada periode penilikan ke-2 tertuang dalam :<br>1. Kronologis Penguasaan Lahan KT Kekasih Indo (Abid Anzir) Desa Mawai Indah, dibuat tanggal 28 September 2021<br>2. Kronologis Claim Lahan Kelompok Rudi Cs di Blok G PT PHK KM 7, dibuat tanggal 15 Agustus 2022<br>3. Kronologis Lahan Sawit yang Terendam an. Bahar, dibuat tanggal 4 September 2022.<br>Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT PHK memiliki dokumen/Laporan Proses Penyelesian Konflik dilengkapi dengan kronologis penyelesaian konflik dan progres terakhir serta dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Konflik. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.4 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **91,67 %**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

21. Indikator 4.5 :
Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.5.1 | : | Adanya hubungan industrial |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK telah memiliki PP yang telah disahkan oleh Instansi terkait dengan masa berlaku sampai 5 Juni 2024 dan telah disosialisasikan kepada karyawannya terutama karyawan baru serta sosialisasi dilakukan pada saat kegiatan briefing pagi (terdapat bukti absensi).<br>Di Lingkungan PT PHK belum terbentuk Serikat Pekerja akan tetapi Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT PHK Nomor : 087/DIR/PHK/I/2023 tanggal 05 Januari 2023 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja<br>PT PHK juga memiliki SOP Hubungan Industrial yang mengatur mekanisme hubungan industrial antara Perusahaan dengan tenaga kerjanya/karyawannya.<br>Implementasi Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat baru masuk kerja sebagai karyawan Perusahaan.<br>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT PHK, diperoleh informasi bahwa PT PHK telah **merealisasikan seluruh** hubungan industrial kepada karyawannya diantaranya seperti kebebasan berserikat, pembayaran gaji yang lancar diatas UMK Kab. Kutai Timur dan sesuai dengan perundangan yang berlaku. |
| 2. | Verifier 4.5.2 | : | Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja |
| | Bobot | : | **Dominan** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nilai | : | **SEDANG** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT PHK Periode Tahun 2020-2022 Bab IX Pasal 42 tentang Pendidikan & Pelatihan Kerja dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. PT PHK telah mengimplementasikan dalam Rencana & Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2021 & 2022 dengan Prosentase rata-rata Jumlah Topik **100** % dan Prosentase Peserta **101 %**<br>Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT PHK memiliki 10 orang (Kurpet = 1, Canhut = 3, Binhut = 2, Nenhut =2 dan PKB-R = 2), namun terdapat 3 (tiga) orang Ganis PHPL **tidak berada** di tempat (Binhut =1, Canhut =1 dan PKB R = 1). |
| 3. | Verifier 4.5.3 | : | Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan PT PHK Periode Tahun 2022 - 2024 Bab II Pasal 10 tentang Promosi dan SOP terkait jenjang karir, serta terdapat implementasi SK HRD Manager terkait promosi karyawan tahun 2021 & 2022 sebanyak 3 (tiga) orang dan telah sesuai dengan mekanisme yang ada.<br>Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT PHK telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, dan telah diimplementasikan. |
| 4. | Verifier 4.5.4 | : | Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya |
| | Bobot | : | **Dominan** |
| | Nilai | : | **BAIK** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT PHK memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT PHK Periode 2022-2024 Bab VI – Bab VIII Pasal 27 – 39, Bukti Setor Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021-2022 dan BPJS Kesehatan Tahun 2021- 2022, terdapat contoh Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.<br>Hasil wawancara dengan bagian HRD dan karyawan PT PHK serta hasil observasi lapangan fasilitas kesejahteraan karyawan di Base Camp PT PHK, diperoleh informasi bahwa PT PHK telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan (PP) kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar tiap bulan dan diatas UMK Kab. Kutim, pemenuhan fasilitas seperti kantor, mess karyawan, kantin/dapur umum, seragam kerja, alat-alat safety, sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana hiburan tersedia cukup lengkap dan representatif, serta terdapat Klinik Perusahaan di Camp Beno Harapan dilengkapi dengan Tenaga Medis 1 orang Dokter dan 2 orang Paramedis, tersedia juga mobil Ambulance.<br>Terkait fasilitas yang ada di Camp Beno Harapan terdapat Surat Keputusan Direktur No.02/DIR/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penggunaan Fasilitas & Kantor yang ada di Wilayah Kab. Kutim secara Bersama antara PT PHK dengan PT MPS. |
| Nilai Kinerja Indikator 4.5 | | : | **BAIK** dengan nilai mencapai **91,67%**, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk |

## E. STANDAR VLK HUTAN

22. Prinsip 1 :

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 1.1.1.a | : | Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan PBPH PT Permata Hijau Khatulitiwa (PT PHK) telah dipenuhi seluruhnya dan adapun kelengkapan dan keabsahan dokumen legal tersebut sebagai berikut :<br>• Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. SK. 631/Menhut-II/2010 tanggal 11 November 2010 Jo. SK. BKPM No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.631/Menhut-II/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri kepada PT. Buana Inti Energi atas Areal Hutan Produksi seluas ±26.345 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.<br>• Terdapat perubahan penamaan baru/ nomenklatur dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) menjadi Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.562/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021.<br>• Dokumen legalitas lainnya yang telah dimiliki PT Permata Hijau Khatulitiwa yang berhubungan dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut :<br>a) Akta pendirian No. 98 tanggal 18 Februari 2010 dengan Notaris Robert Purba, SH. di Jakarta. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-12864.AH.01.01.Tahun 2010 Tanggal 12 Maret 2010.<br>b) Akta perubahan terakhir No. 33 tanggal 20 Mei 2022 dengan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH., MKn di Jakarta Pusat. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0098197.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 27 Mei 2022..<br>c) NPWP No. 02.991.961.0-011.000 atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa dengan alamat Jl. Syarifuddin Yoes No. 68 A-68 B RT. 45, Kel. Sepingan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.<br>d) Terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis resiko No. 8120000941871 yang dicetak tanggal 7 September 2022. |
| 2. | Verifier 1.1.1.b | : | Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman No. S.1188/VI-BIKPHH/2010 tanggal 8 Desember 2010 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan dan di tandatangani oleh Imam Santoso /NIP. 19530922 198203 1 001. Berdasarkan SPP IIUPHHK-HT tersebut total kewajiban diperintahkan kepada PT Buana Inti Energi yaitu sebesar Rp. 68.497.000,-.<br>Terdapat bukti setor IIUPHHK atas nama PT Buana Inti Energi sebesar Rp. 68.497.000,- via Bank Mandiri tertanggal 14 Desember 2010 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta. |
| 3. | Verifier 1.1.1.c | : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). |
| | Nilai | : | **Not Applicable (N/A)** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada areal PBPH PT Permata Hijau Khatulitiwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar PBPH atau Non Kehutanan. |

23. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 2.1.1.a | : | Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :<br>- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut.<br>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval*<br>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen RKUPH Tahun 2021 Periode Tahun 2022 – 2031 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : SK.4815/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021. SK Pengesahan RKUPH ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 21 Juli 2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurrazi, S.H/ NIP 19631015 199403 1 002) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031.<br>➢ Terdapat lampirkan Peta RKUPH PT Permata Hijau Khatulistiwa periode tahun 2022 – 2031 Skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Direktur PT PHK (Riahman Sinaga) dan disetujui oleh A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.b Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.Sc/ NIP. 19621119 199003 1 001).<br>➢ Selama periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023) PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menerbitkan dokumen RKT dengan rincian sebagai berikut :<br>a. Dokumen **Rencana Kerja Tahunan (RKT)** PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2021 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa berdasarkan SK Direktur PT PHK No. SK-01/PHK/0201/2021 tanggal 2 Januari 2021 dan dilampirkan peta RKT Tahun 2021 dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPHPL Canhut (Cryestian Haryantho / No. Reg. 02218-11/CANHUT/XX/2017) dan disetujui oleh Direktur (Riahman Sinaga) ;<br>b. Dokumen **Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)** PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2022 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa berdasarkan SK Direktur PT PHK No. SK-01/PHK/0101/2022 tanggal 1 Januari 2022 dan dilampirkan peta RKTPH Tahun 2022 dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPHPL Canhut (Cryestian Haryantho / No. Reg. 01210006603) dan disetujui oleh Direktur (Riahman Sinaga);<br>c. Dokumen **Revisi ke-1 Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)** PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2022 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa berdasarkan SK Direktur PT PHK No. SK-13/PHK/0106/2022 tanggal 1 Juni 2022 dan dilampirkan peta Revisi RKTPH Tahun 2022 PT PHK dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Nuas Yunianto) dan disetujui oleh Direktur (Yudiana);<br>d. Dokumen **Revisi ke-2 Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)** PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2022 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa berdasarkan SK Direktur PT PHK No. SK-17/PHK/2510/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan dilampirkan Peta Perubahan RKTPH Tahun 2022 PT PHK dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Canhut (Nuas Yunianto) dan disetujui oleh Direktur (Yudiana);<br>e. Dokumen **Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)** PT Permata Hijau Khatulistiwa Tahun 2023 disahkan secara self approval oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa berdasarkan SK Direktur PT PHK No. SK-01/PHK/0101/2023 tanggal 1 Januari 2023 dan dilampirkan peta RKTPH Tahun 2023 PBPH PT PHK dengan skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH Kurpet (Andi Muhammad Hafizul Ihsan / No. Reg. 16220017399) dan disetujui oleh Direktur (Yudiana, S.Hut).<br>➢ PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki 2 personil GANISPH Canhut yaitu : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | a. Nuas Yuniarto dengan No. Register : 01210015880 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dengan No. 111121048 tanggal 17 November 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 12 November 2021 s.d 12 November 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 17 November 2021 s.d 12 November 2024.<br>b. Esau Pelipus dengan No. Register : 01220018072 sesuai Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda, dengan No. 111122018 tanggal 21 November 2022, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 25 Agustus 2022 s.d 25 Agustus 2025 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 21 November 2022 s.d 25 Agustus 2025. |
| 2. | Verifier 2.1.1.b | : | Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memilik Peta RKT Tahun 2021, 2022, 2023 yang telah disetujui oleh Direktur dan pada peta tersebut memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang dan tergambar pada peta berwarna merah seperti Sempadan Sungai (SS), KPPN, DPSL dan Buffer Zone.<br>Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi di Blok RKTPH Tahun 2022 dijumpai penandaan batas seperti :<br>1) Sempadan Sungai Jelmuan berupa plang dan patok cat kuning merah berada pada koordinat N $0^0$ 33' 59" dan E $116^0$ 54' 36". Adapun penandaan batas SS Jelmuan pada kiri kanan sungai yang telah ditandai sepanjang 3,6 km.<br>2) Sempadan Sungai Loa Merah berupa plang dan patok cat kuning merah berada pada koordinat N $0^0$ 32' 32" dan E $116^0$ 53' 29". Adapun penandaan batas SS Loa Merah pada kiri kanan sungai yang telah ditandai sepanjang 1,8 km. |
| 3 | Verifier 2.1.1.c | : | Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada Peta Lampiran RKT PT Permata Hijau Khatulitiwa Tahun 2021, 2022, 2023 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan Blok/ petak tebangan yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulitiwa.<br>Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai pada Blok dan petak RKT 2021, 2022, 2023 berupa penandaan berupa pemasangan Plang, patok kayu dan patok pipa paralon dan keberadaannya telah sesuai dengan peta RKT. |
| 4 | Verifier 2.2.1.a | : | Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen RKUPH Tahun 2021 Periode Tahun 2022 – 2031 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. Nomor : SK.4815/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2021 tanggal 21 Juli 2021. SK Pengesahan RKUPH ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc / NIP 19630807 198803 1 001) pada tanggal 21 Juli 2021 dan disalin sesuai dengan aslinya oleh Kelapa Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik (Fahrurrazi, S.H/ NIP 19631015 199403 1 002) dan terdapat Stempel Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. SK RKUPH Periode Tahun 2022 - 2031 berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2031.<br><br>Dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2022 – 2031, disebutkan bahwa sistem silvikultur yang digunakan oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa yaitu Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).<br><br>Rencana penyiapan lahan dan penanaman, serta pemanenan untuk jangka waktu periode 2021-2030, yaitu sebagai berikut :<br><br>a. Rencana penyiapan lahan dan penanaman seluas ± 36.012,60 Ha :<br><br>Pemanfaatan HHK Budidaya Tanaman jenis Acacia spp. dan Eucalyptus spp. daur 6 tahun seluas ± 36.012,60 Ha yang terdiri dari :<br><br>1) Daur I seluas ± 21.580,37 Ha yang dilakukan pada areal bekas pemanenan (replanting) seluas ± 13.768,70 Ha serta areal semak belukar dan tanah kosong seluas ± 7.811,67 Ha dan;<br><br>2) Daur II seluas ± 14.432,23 Ha yang dilakukan pada areal replanting.<br><br>b. Rencana pemanenan kayu sebesar ± 4.903.127,34 m3 terdiri dari :<br><br>1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada areal bekas pemanenan (replanting) seluas 13.768,70 Ha dengan volume ±2.393.881,27 m3.<br><br>2) Kayu hasil pemanenan tanaman/ replanting jenis Acacia spp. dan Eucalyptus spp. seluas 14.432,23 Ha dengan volume ± 2.509.246,07 m3.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</td></tr>
<tr><td></td><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Berdasarakan dokumen RKT 2021, 2022 dan 2023, diverifikasi PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki rencana pemanfaatan kayu alam untuk penyiapan lahan pada LOA dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Periode</th><th colspan="2">Rencana</th><th colspan="2">Realisasi</th><th colspan="2">Persentase</th></tr>
<tr><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>RKT 2021 (CO RKT 2020)</td><td>3,004.50</td><td>1,750.28</td><td>1,435.20</td><td>249.91</td><td>47.77</td><td>14.83</td></tr>
<tr><td>2</td><td>RKT 2022</td><td>2,752.30</td><td>281.22</td><td>62.90</td><td>-</td><td>2.29</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>RKT 2023 (CO RKT 2022) s.d 31 Januari 2023</td><td>540.40</td><td>49.12</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
Volume pemanfaatan kayu alam di lokasi LOA teraliasi di RKT 2021 sebanyak 249,91 m3 (14,83%) dari rencana 1.750,28 m3. Adapun kayu bulat hasil penyiapan lahan tersebut telah habis terangkut ke industri lokal dan sebagain dipakai sendiri sesuai BA DKDS Tahun 2022.<br><br>Lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan berada di lokasi LOA pada RKT 2021, 2022 dan 2023, telah sesuai dengan RKT 2021, 2022 dan 2023 yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Permata Hijau Khatulistiwa.</td></tr>
</table>

24. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verifier 3.1.1. | : | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Pada periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023), diverifikasi GANISPH PKB PT Permata Hijau Khatulistiwa, yaitu :<br>1) Candra Pamadya, S.Hut dengan No. Register 04210006368 berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. SK.1071/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penugasan GANISPHPL pada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan berlaku sampai dengan tanggal 13 Januari 2023.<br>2) Nurcahyadi dengan No. Register 04210015745 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda (Erwan Sudaryanto), dengan No. 110821127 tanggal 27 Agustus 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 25 Agustus 2021 s.d 25 Agustus 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 27 Agustus 2021 s.d 25 Agustus 2024 ;<br>3) Surya Maulia Andika dengan No. Register 04210015713 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda (Erwan Sudaryanto), dengan No. 110921019 tanggal 6 September 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 30 Agustus 2021 s.d 30 Agustus 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 6 September 2021 s.d 30 Agustus 2024 ;<br>4) Alfian Anang Fawzi dengan No. Register 04210016408 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda (Erwan Sudaryanto), dengan No. 111221023 tanggal 20 Desember 2021, dan masa berlaku Register yaitu dari tanggal 10 Desember 2021 s.d 10 Desember 2024 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 20 Desember 2021 s.d 10 Desember 2024.<br>➢ PT Permata Hijau Khatulitiwa telah menunjuk GANISPH PKB sebagai Pembuat LHP yaitu sebagai berikut :<br>1) Pada tahun 2021 s.d 2022 PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menunjuk GANISPH PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Nurcahyadi dengan No. Register 04210015745 berdasarkan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dengan No. 118293444828 tanggal 7 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 7 Oktober 2021 s.d 25 Agustus 2024;<br>2) Pada periode September 2022 s.d saat audit (Januari tahun 2023) PT Permata Hijau Khatulistiwa telah menunjuk GANISPH PKB sebagai Pembuat LHP atas nama Surya Maulia Andika dengan No. Register 04210015713 sesuai SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dengan No. 118293444828 tanggal 7 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 14 Juli 2022 s.d 3 Februari 2023.<br>➢ Pada periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023), terdapat penerbitan buku ukur lapangan yang terinput di buku ukur sipuhh mencakup hasil panen kayu alam dan panen kayu tanaman untuk penyiapan lahan yaitu sebagai berikut :<br>1) Buku Ukur Panen kayu alam yaitu periode RKT Tahun 2021 (Februari 2021 s.d. Desember 2021) dengan total sebanyak 3 set dengan jumlah 322 batang dan volume sebesar 249,91 $m^3$.<br>2) Buku Ukur Panen kayu tanaman yaitu periode RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 (s.d 31 Januari 2023) dengan total sebanyak 12 set dengan volume sebesar 51.844,46 $m^3$.<br>➢ Selama periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023) PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan hasil panen kayu alam dan panen kayu tanaman untuk penyiapan lahan yaitu sebagai berikut :<br>1) LHP Panen kayu alam yaitu periode RKT Tahun 2021 (Februari 2021 s.d. Desember 2021) dengan total sebanyak 8 set dengan jumlah 322 batang dan volume sebesar 249,91 $m^3$. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2) LHP Panen kayu tanaman yaitu periode RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 (s.d 31 Januari 2023) dengan total sebanyak 8 set dengan volume sebesar 51.844,46 $m^3$.<br>➢ Berdasarkan uji petik Tumpukan kayu di TPn menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 5,43 m3 (0,84 %). |
| 2 | Verifier 3.1.2. | : | Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :<br>a) TPK hutan ke TPK Antara<br>b) TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,<br>c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ PT Permata Hijau Khatulitiwa telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara tahun 2021, 2022, dan 2023 melalui SK Direktur PT PHK.<br>➢ PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki GanisPH PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK-Hutan, SKSHHK-Lanjutan dan sebagai P3KB, yaitu diantaranya :<br>1) Pada periode tahun 2021 s.d bulan Oktober 2021 penerbit SKSHHK-Hutan atas nama Candra Pamadya, S.Hut dengan No. Reg. 01890-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK. Direktur PT PHK No. SK-06/PHK/401/2021 tanggal 4 Januari 2021;<br>2) Pada periode November 2021 s.d Agustus 2022 penerbit SKSHHK-Hutan atas nama Nurcahyadi dengan No. Register 04210015745 berdasarkan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dengan No. 118293444828 tanggal 7 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 7 Oktober 2021 s.d 25 Agustus 2024 ;<br>3) Pada periode September 2022 s.d saat audit (Januari 2023) penerbit SKSHHK-Hutan atas nama Surya Maulia Andika dengan No. Register 04210015713 berdasarkan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dengan No. 118293444828 tanggal 7 Oktober 2021. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 7 Oktober 2021 s.d 30 Agustus 2024 ;<br>4) Pada periode Agustus 2022 s.d saat audit (Januari 2023) penerbit SKSHHK-Lanjutan & P3KB atas nama Alfian Anang Fawzi dengan No. Register 04210016408 berdasarkan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dengan No. 118165200152 tanggal 1 Juli 2022. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 1 Juli 2022 s.d 31 Desember 2022 ;<br>5) Pada periode Agustus 2022 s.d saat audit (Januari 2023) perpanjangan penerbit SKSHHK-Lanjutan & P3KB atas nama Alfian Anang Fawzi dengan No. Register 04210016408 berdasarkan SK Penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dengan No. 114549622904 tanggal 5 Januari 2023. Adapun masa berlaku penempatan dari tanggal 5 Januari 2023 s.d 10 Desember 2024.<br>➢ Selama periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023), PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK dan dilampirkan Daftar Kayu Bulat (DKB) dengan identitas<br>1) Dari TPK Hutan menuju Indsutri dengan menggunakan Truck yaitu sebanyak 24 set dokumen SKSHHK terdiri atas 265 batang dengan volume sebesar 199,22 m3;<br>2) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Batu Balai dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 1.647 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 49.631,46 m3;<br>3) Dari TPK Antara Logpond Batu Balai menuju Indsutri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 16 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 34.784,64 m3. |
| 3. | Verifier 3.1.3.a | : | Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. |
| | Nilai | : | **Not Applicable (N/A)** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan Pemegang PBPH Hutan Produksi pada Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman dengan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | memanfaatkan kayu alam di lokasi LOA. Pada periode Januari 2022 sampai dengan Februari 2023 tidak terdapat pemanfaatan kayu alam di lokasi LOA untuk penyiapan lahan, sehingga tidak dijumpai tanda-tanda PUHH/ Barcode dan pada periode tersebut PT Permata Hijau Khatulistiwa hanya melakukan kegiatan panen kayu tanaman. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada Penilikan Ke-2 Kinerja PHL PT Permata Hijau Khatulistiwa. |
| 4. | Verifier 3.1.3.b | : | Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin |
| | Nilai | : | **Not Applicable (N/A)** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan Pemegang PBPH Hutan Produksi pada Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman yang melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman dengan memanfaatkan kayu alam di lokasi LOA. Pada periode Januari 2022 sampai dengan Februari 2023 tidak terdapat pemanfaatan kayu alam di lokasi LOA untuk penyiapan lahan, sehingga tidak dijumpai tanda-tanda PUHH/ Barcode dan pada periode tersebut PT Permata Hijau Khatulistiwa hanya melakukan kegiatan panen kayu tanaman. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada Penilikan Ke-2 Kinerja PHL PT Permata Hijau Khatulistiwa. |
| 5. | Verifier 3.1.4 | : | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023), PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri DKB dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK yaitu :<br>1) Dari TPK Hutan menuju Indsutri dengan menggunakan Truck yaitu sebanyak 24 set dokumen SKSHHK terdiri atas 265 batang dengan volume sebesar 199,22 m3;<br>2) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Batu Balai dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 1.647 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 49.631,46 m3;<br>3) Dari TPK Antara Logpond Batu Balai menuju Indsutri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 16 set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 34.784,64 m3. |
| 6. | Verifier 3.2.1.a | : | Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023) diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan. Adapun total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut :<br>• DR sebesar US$ 4.291,37<br>• PSDH sebesar Rp 465.659.964,- |
| 7 | Verifier 3.2.1.b | : | Bukti Setor DR dan/atau PSDH |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan pembayaran DR dan PSDH atas LHP yang diterbitkan selama periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023), sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan yaitu:<br>• Total Pembayaran DR sebesar US$ 4.291,37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Total Pembayaran PSDH sebesar Rp 465.659.964,-<br>Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Permata Hijau Khatulistiwa, diverifikasi bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status "lunas" sampai pada saat audit dilaksanakan. |
| 8 | Verifier 3.2.1.c | : | Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan.<br>Berdasarkan hasil telaah diketahui bahwa pembayaran atas DR dan/atau PSDH yang dilakukan oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa sudah sesuai dengan tagihan PNBP yang diterbitkan melalui SI-PNBP-SIMPONI dan sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. |
| 9 | Verifier 3.3.1 | : | Dokumen PKAPT |
| | Nilai | : | **Not Applicable (N/A)** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tertanggal 10 Agustus 2018.<br>Dengan demikian, verifier 3.3.1. tidak diterapkan pada Penilikan ke 2 Kinerja PHL PT Permata Hijau Khatulistiwa. |
| 10 | Verifier 3.3.2 | : | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Permata Hijau Khatulistiwa telah melakukan penjualan kayu dengan menggunakan kapal pengangkut kayu (tongkang) yaitu sebanyak 14 set dengan tujuan ke PT Balikpapan Chip Lestari. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil panen kayu tanaman PT Permata Hijau Khatulistiwa. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia. |
| 11 | Verifier 3.4.1 | : | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa merupakan PBPH yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 041.SPHPL.019-IDN dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Maret 2025.<br>Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 041.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan. |

25. Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 4.1.1 | : | Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ringkasan Justifikasi | : | Dokumen lingkungan yang terdapat pada PT Permata Hijau Khatulistiwa yang dapat diverifikasi adalah Dokumen laporan utama ANDAL, Dokumen Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Pemantauan Lingkungan (RPL) yaitu seperti berikut :<br>• Dokumen ANDAL/RKL-RPL yang dimiliki oleh PT Permata Hijau Khatulistiwa masih menggunakan nama perusahaan lama yaitu bernama PT Buana Inti Energi. Perubahan Nama Pemegang IUPHHK-HTI dari PT Buana Inti Energi menjadi PT Permata Hijau Khatulistiwa sesuai dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDH/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.631/MENHUT-II/2010 Tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Buana Inti Energi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 26.345 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK tersebut ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; Franky Sibarani<br>• Adapun pada Pasal 1 pada SK BKPM tersebut berbunyi :<br>Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.631/MENHUT-II/2010 tanggal 11 November 2010 tentang Pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Kepada PT Buana Inti Energi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 26.345 Ha (Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, beserta Lampirannya, diubah sebagai berikut :<br>a) Sepanjang menyangkut nama badan hukum perusahaan pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang semula PT Buana Inti Energi menjadi PT Permata Hijau Khatulistiwa.<br>b) Semua hak dan kewajiban IUPHHK-HTI beralih dari PT Buana Inti Energi kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa.<br>• Terdapat SK Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1623/LINGK/BPPMD-PTSP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perubahan Izin Lingkungan Atas Dokumen AMDAL Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Luas Areal ± 26.345 Ha PT Buana Inti Energi Kepada PT Permata Hijau Khatulistiwa dan Penambahan Pengelolaan dan Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan. SK tersebut ditandatangani An. Gubernur Kalimantan Timur Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan Timur oleh H. Diddy Rusdiansyah A.D, SE, MM / NIP. 19640627 199003 1 006.<br>• Dokumen ANDAL disusun oleh konsultan pelaksana PT. Sarbi Moerhani Lestari dengan Ir. H. Ateng Sutisna, MBA sebagai Direktur Utama yang beralamat di Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F1 No. 3-5 Ciomas, Bogor, Jawa Barat 16610, Indonesia.<br>• Dokumen ANDAL PT PHK (d/h PT BIE) telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan ± 25.465 Ha. |
| 2. | Verifier 4.1.2.a | : | Dokumen RKL dan RPL. |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Berdasarkan hasil verifikasi tersedia dokumen RKL dan RPL PT Permata Hijau Khatulistiwa yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan yaitu sebagai berikut : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Bahwa Pemegang izin IUPHHK-HTI dalam hal ini atas nama PT Permata Hijau Khatulistiwa (d/h PT Buana Inti Energi) telah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) lengkap dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.34/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Buana Inti Energi dengan Luas Cadangan ± 25.465 Ha.<br>• Dalam Dokumen RKL dan RPL PT Permata Hijau Khatulistiwa (d/h PT Buana Inti Energi) disebutkan bahwa lokasi PT PHK terletak di Kelompok Hutan S. Telen – S. Sangata, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, tetapi berdasarkan surat Rekomendasi Gubernur Kalimatan Timur No. 522.21/10056/EK tanggal 28 Oktober 2009, areal yang direkomendasikan seluas ± 46.712 Ha . Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. S.481/Menhut-VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 perihal Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HT, luas areal yang disetujui adalah ± 25.465 Ha. Berdasarkan hal tersbut, maka kajian selanjutnya mengacu pada luasan ± 25.465 Ha.<br>• Dokumen RKL dan RPL disusun oleh konsultan pelaksana PT. Sarbi Moerhani Lestari dengan Ir. H. Ateng Sutisna, MBA sebagai Direktur Utama yang beralamat di Jl. Raya Taman Pagelaran Blok F1 No. 3-5 Ciomas, Bogor, Jawa Barat 16610, Indonesia.<br>• Berdasarkan verifikasi dokumen RKL PT PHK, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup PT PHK adalah :<br>A. Tahap Pra Konstruksi, terdiri :<br>1. Pengurusan Perizinan<br>2. Sosialisasi dan Konsultasi Publik dengan Masyarakat Sekitar<br>a) Komponen Fisik Kimia<br>b) Komponen Biologi<br>c) Komponen Sosial dan Kesehatan Masyarakat<br>B. Tahap Konstruksi, terdiri :<br>1. IHMB & Deliniasi Mikro,<br>2. Penataan Areal Kerja<br>3. Pembukaan Wilayah Hutan<br>4. Penyiapan Lahan<br>5. Pengadaan Bibit<br>6. Penanaman<br>7. Pemeliharaan Tanaman<br>8. Penelitian dan Pengembangan<br>9. Perlindungan dan Pengamanan Hutan<br>10. Pengadaan Sarana Prasarana<br>11. Pengadaan Tenaga Kerja<br>12. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)<br>C. Tahap Operasi, terdiri :<br>1. Pemanenan Kayu<br>2. Pemanenan Lateks<br>3. Pengangkutan Kayu dan Lateks<br>4. Pengelolaan Lateks Pasca Panen<br>D. Tahap Pasca Operasi, terdiri :<br>1. Pemutusan Hubungan Kerja<br>2. Penyerahan Asset Perusahaan Kepada Pemerintah |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Verifier 4.1.2.b | : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ PT Permata Hijau Khatulistiwa telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL RPL setiap 6 bulan sekali yaitu sbb:<br>1) Laporan Pelaksanaan Semester I tahun 2021<br>2) Laporan Pelaksanaan Semester II tahun 2021<br>3) Laporan Pelaksanaan Semester I tahun 2022<br>➢ Laporan Pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, BPHP Wil. XI Samarinda, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutim dan UPTD KPHP Bengalon Kab. Kutim dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ stempel dari instansi tersebut.<br>➢ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa :<br>a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan pada Kawasan lindung Sempadan Sungai Jelmuan dan Sempadan Sungai Loa Merah pada RKT Tahun 2022 berupa plang dan patok cat kuning merah;<br>b. Kegiatan pengelolaan berupa penanaman pengayaan di Kawasan lindung sempadan sungai jelmuan dan loa merah yaitu jenis Kapur, meranti, durian dan rambai.<br>c. Pemasangan plang himbauan stop pembakaran hutan dan lahan pada koordinat N $0^0$ 37’ 40” E $116^0$ 56’ 35”; N $0^0$ 34’ 6” E $116^0$ 54’ 40”;<br>d. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) dengan menggunakan stik ukur yang dipasang pada SS Jelmuan pada koordinat N $0^0$ 34’ 8” E $116^0$ 54’ 39” dan SS Loa Merah pada koordinat N $0^0$ 32’ 30” E $116^0$ 53’ 29”;<br>e. Pemantauan Erosi dengan metode stik ukur pada RKT Tahun 2021 pada koordinat N $0^0$ 35’ 55” E $116^0$ 56’ 19” dan RKT Tahun 2022 pada koordinat N $0^0$ 37’ 36” E $116^0$ 56’ 34”<br>f. Terdapat pemantauan kualitas air (pada sungai sangatta kanan, loa merah hulu dan hilir, sungai jelmuan hulu dan hilir, DAM Mawai Indah, Sungai Himba Lestari), kualitas udara ambien, emisi sumber tak bergerak, kebisingan dan kualitas tanah (pada tanah terganggu dan tanah utuh), yang pengambilan sampelnya dilakukan 1x dalam kurun waktu 6 bulan oleh pihak kedua PT Global Enviroment Laboratory dan terdapat juga hasil laboratorium atas hasil uji tersebut serta dituangkan dalam laporan RKL RPL.<br>g. Kegiatan sosial berupa bantuan-bantuan seperti bantuan buka puasa bersama, bantuan hewan qurban, budidaya ikan nila, bantuan perbaikan jalan, bantuan kegiatan HUT RI dan bantuan hari besar agama (Natal).<br>➢ PT Permata Hijau Khatulitiwa telah membentuk Brigdalkarhutla melalui SK Direksi No. 03/DIR/PHK/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 dengan susunan pengurus sebagai berikut :<br>**Kepala Brigdalkarhutla** : Yudiana<br>**Wakil Brigdalkarhutla** : Roni Rizali<br>**Sekretaris Brigade** : M. Fajar Sidik<br>**Koordinator Pencegahan, Peringatan, dan Deteksi Dini Karhut** : Frank Kende Tonapa<br>**Koordinator Penanggulangan & Penanganan Pasca Karhut** : Agmi Bagus Kartiko |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Kepala Regu Inti 1** | : | Agmi Bagus Kartiko |
| | | | **Anggota** | : | 14 personil |
| | | | **Kepala Regu Inti 2** | : | Y. Ngiso Logha |
| | | | **Anggota** | : | 14 personil |
| | | | **Kepala Regu Pendukung** | : | Jamhari |
| | | | **Kepala Regu Pembantu 1** | : | Suradi Welas |
| | | | **Kepala Regu Pembantu 2** | : | Usup Hariadi |

26. Prinsip 5 :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Verifier 5.1.1.a | : | Pedoman/prosedur K3 |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa memiliki dokumen Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 11 judul dan dokumen SOP disiapkan oleh EHS Head, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh Direktur.<br><br>PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki penanggung jawab K3 di lapangan dengan dibentukanya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan SK Direksi PT PHK No. 095/PHK/DIR/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).<br><br>Struktur Organisasi P2K3 PT PHK telah terdaftar dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor : KEP/2571/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Permata Hijau Khatulistiwa. Berdasarkan SK tersebut susunan kepengurusan P2K3 PT PHK sebagai berikut :<br><br>- Ketua : Yudiana<br>- Sekretaris : Agmi Bagus Kartiko<br>- Anggota :<br>1. Arman Chan<br>2. Bachtiar Widodo T.<br>3. Jamhari<br>4. Agus Susilo<br>5. Roni Rizali |
| 2. | Verifier 5.1.1.b | : | Ketersediaan peralatan K3 |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PBPH PT Permata Hijau Khatulistiwa yang dibuat oleh Agmi Bagus Kartiko (Assistant EHS- FC) dan diperiksa oleh Roni Rizali (Asst. Kep. EHS-FC serta diketahui oleh Yudiana (Estate Manager) tertanggal 31 Januari 2023.<br><br>Berdasarkan hasil uji petik terhadap peralatan K3, dapat dijumpai peralatan K3, diantaranya :<br>- Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot yang telah dibagikan kepada Karyawan.<br>- Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada kantor, bangunan Mess Karyawan dan Kantin. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | - Tersedia Kotak P3K yang berisi peralatan P3K di setiap bangunan seperti mess karyawan dan kantin<br>- Terdapat rambu – rambu K3 seperti wajib menggunakan APD yang dipasang di lokasi strategis.<br>- Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang di basecamp PT PHK.<br>- Terdapat tempat berkumpul (assembly point) jika terdapat keadaan darurat, yang dipasang di basecamp PT PHK dan pos security/ masuk areal PT PHK.<br>- Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan seperti pompa punggung, pompa jinjing, pompa apung, selang dll yang berada di basecamp PT PHK. |
| 3. | Verifier 5.1.1.c | : | Catatan kecelakaan kerja |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | ➢ Terdapat dokumen performance data kecelakaan kerja yang memuat catatan kecelakaan kerja selama periode audit (Februari 2021 s.d Januari 2023). Berdasarkan dokumen tersebut diverifikasi terdapat catatan kecelakaan kerja yaitu sebanyak 8 kejadian dengan kategori ringan.<br>➢ Pada setiap kejadian kecelakaan kerja dilampirkan dokumen pelaporan awal kecelakaan yang diisi oleh Askep dan Salinan dikirim kepada Departemen EHS & atasan/ Manajer bersangkutan. Adapun pengiriman laporan kecelakaan dilakukan sebelum akhir shift kejadian (tidak kurang sari 1 x 24 jam).<br>➢ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Irwan Alfian dengan jabatan sebagai Askep HSE, diketahui terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain :<br>a. Sosialisasi tentang K3 dan induksi K3 yang lakukan pada saat penerimaan karyawan dan tamu.<br>b. Safety Talk dan Breefing K3 pada saat akan memulai pekerjaan dilakukan setiap hari Kamis<br>c. Meeting P2K3 dilakukan 1x setiap bulannya.<br>d. Pembagian dan Penggunaan APD saat bekerja.<br>e. Pemasangan himbauan dan rambu rambu K3. |
| 4. | Verifier 5.2.1 | : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | Pada periode audit, diketahui bahwa di lingkungan karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa masih belum terbentuk/tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan. Dalam hal ini telah dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT Permata Hijau Khatulistiwa, Nomor: 087/DIR/PHK/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusaaan; Yudiana sebagai Direktur.<br>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Permata Hijau Khatulistiwa diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka. |
| 5. | Verifier 5.2.2 | : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2022 - 2024 dibuat di Balikpapan pada tanggal 7 April 2022 dan ditandatangani oleh Riahman Sinaga (Direktur).<br>Dokumen Peraturan Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | KEP.560/1730/B.PHI&JAMSOSTEK/2022 tanggal 8 Juni 2022 dan berlaku sejak tanggal 6 Juni 2022 s.d 5 Juni 2024. Dokumen PP telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja da Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 54/PP/BPHI&JSTK/2022. |
| 6. | Verifier 5.2.3 | : | Pekerja yang masih di bawah umur |
| | Nilai | : | **Memenuhi** |
| | Ringkasan Justifikasi | : | PT Permata Hijau Khatulistiwa tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Yoseph Febrianto Realino dengan jabatan/ posisi sebagai PKWT Plantation yang lahir di Wologahar pada tanggal 8 Februari 2003 dan masuk pertama kerja pada tanggal 9 Desember 2022, saat berusia 19 Tahun 10 bulan. |

## 2. TOTAL NILAI INDIKATOR PHL

| No. | Indikator | Nilai Kinerja Indikator | Nilai Kematangan/ Bobot Indikator | Nilai Kinerja Maksimal Indikator |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.1 | Baik | 3 | 3 |
| 2. | 1.2 | Baik | 3 | 3 |
| 3. | 1.3 | Sedang | 2 | 3 |
| 4. | 1.4 | Sedang | 2 | 3 |
| 5. | 2.1 | Sedang | 2 | 3 |
| 6. | 2.2 | Baik | 3 | 3 |
| 7. | 2.3 | Baik | 3 | 3 |
| 8. | 2.4 | Baik | 3 | 3 |
| 9. | 2.5 | Baik | 3 | 3 |
| 10. | 2.6 | Sedang | 2 | 3 |
| 11. | 3.1 | Sedang | 2 | 3 |
| 12. | 3.2 | Baik | 3 | 3 |
| 13. | 3.3 | Baik | 3 | 3 |
| 14. | 3.4 | Baik | 3 | 3 |
| 15. | 3.5 | Sedang | 2 | 3 |
| 16. | 3.6 | Sedang | 2 | 3 |
| 17. | 4.1 | Baik | 3 | 3 |
| 18. | 4.2 | Sedang | 2 | 3 |
| 19. | 4.3 | Baik | 3 | 3 |
| 20. | 4.4 | Baik | 3 | 3 |
| 21. | 4.5 | Baik | 3 | 3 |
| **JUMLAH** | | | **55** | **63** |
| **TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR** | | | **55 / 63 x 100 % = 87,30 %**<br>tanpa verifier Dominan bernilai Buruk | |

**3. NILAI AKHIR KINERJA PHL**

Total nilai kinerja seluruh indikator = 87,30% dengan tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI standar VLK, maka nilai akhir kinerja PHL PT Permata Hijau Khatulistiwa pada kegiatan penilikan ke-2 adalah **"BAIK"**

Samarinda, 10 Maret 2023
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

**Ir Kurnia, IPU**
Direktur